

**Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat
(Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Sumatera Barat**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Padang

2021

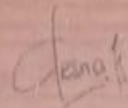
HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Rahmatul Mahgribi
Nomer Buku Pokok : 1610842008
Judul Skripsi : Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

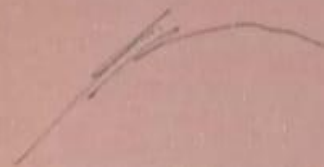
"Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas"

Pembimbing I

Pembimbing II

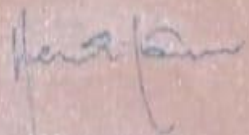


Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP
NIP.198112162005012001



Muhammad Ihsan Kabullah, S.IP, MPA
NIP.198509042009121002

Mengotahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc
NIP.197904012003121003

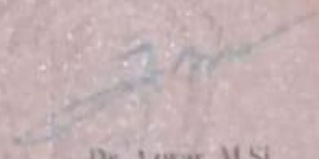
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Administrasi Publik pada hari Selasa, 14 Desember 2021, bertempat di Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik, dengan tim penguj:

No	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wewen Kusumi Rahayu S.AP, M.Si	Ketua	
2	Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA	Sekretaris	
3	Kusdarini, S.IP, M.PA	Anggota	
4	Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc	Anggota	
5	Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP	Pembimbing I	
6	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA	Pembimbing II	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Azwar, M.Si

NIP. 196712261993031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat" adalah asli dan sepanjang pengetahuan saya tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis dan dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan menyebutkan nama pengarangserta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Padang, 11 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Kahmatul Mahgriba
1610842008

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat”**, serta shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada kehidupan yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan tenaga, materi, informasi, waktu maupun dorongan semangat yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan, ayahanda tercinta papa M. Nurdin AR, ibunda tersayang mama Irma Zuhelmi, saudara-saudara tersayang Zikral Hamdi, M Nur Fajri, dan Amirul Azmi.
2. Ibu Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA selaku pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu dan mengerahkan

tenaga serta fikiran dalam membimbing, memberikan motivasi, arahan, dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc selaku ketua jurusan dan Bapak Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA selaku sekretaris jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
4. Ibu Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si, Bapak Roni Ekha Putra, S.IP, M.PA, Ibu Kusdarini, S.IP, M.PA, dan Bapak Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc selaku dosen penguji ujian proposal dan skripsi yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik serta dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas atas dedikasinya dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis serta bantuannya selama ini.
6. Staf pegawai sub-bagian akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, yang telah membantu penulis urusan administrasi terkait penyelesaian skripsi ini.
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi, Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, dan seluruh pihak yang telah memberikan data

dan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada orang yang paling penulis sayang, Ibuk Kepala Tata Usaha Annisa Elly Octaviani, S.M yang selalu mau mendengar keluhan, memberi saran dan masukan, mendampingi untuk turun lapangan mencari data dan informasi yang dibutuhkan, selalu menemani dalam setiap perbaikan hingga beban penulis bisa ringan dan penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Jangan sedih-sedih, semangat terus bekerja dan raih cita-citanya!
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, terutama angkatan 2016.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Padang, 11 Januari 2022
Yang Menyatakan,

Rahmattul Mahgribi
1610842008



ABSTRAK

Rahmattul Mahgribi, No BP 1610842008, Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2021. Dibimbing oleh: Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP dan M. Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 151 halaman dengan referensi 20 buku, 11 jurnal, 1 dokumen pemerintah, 4 peraturan perundang-undangan, dan 4 website internet.

Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah melalui program pemberdayaan, salah satunya terhadap koperasi. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan pemberdayaan terhadap koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan salah satu kelompok sarannya yaitu Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Dalam observasi awal yang peneliti lakukan terhadap pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan koperasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemberdayaan terhadap Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teori yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ini adalah teori Cho dengan dua variabel utama yaitu pemberdayaan struktural dan pemberdayaan psikologis untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa aspek pemberdayaan koperasi menurut Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 yang dilaksanakan yaitu aspek manajemen, pendidikan dan pelatihan, kemitraan, dan pemasaran. Apabila dilihat berdasarkan variabel pada teori Cho terdapat beberapa indikator yang tidak terlaksana. Berdasarkan variabel pemberdayaan struktural dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana terutama pada partisipasi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Kemudian, berdasarkan variabel pemberdayaan psikologis juga dapat dilihat beberapa indikator belum terlaksana antara lain masih rendahnya kompetensi pelaksana kegiatan, masih minimnya kegiatan peningkatan motivasi bagi koperasi, dan masih terdapat beberapa hal yang belum memberikan dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan demikian, berdasarkan teori Cho pada pelaksanaan pemberdayaan koperasi berdasarkan perda nomor 16 tahun 2019 belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pemberdayaan Koperasi, Pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi

ABSTRACT

Rahmattul Mahgribi, No BP 1610842008, Empowerment of Industrial Cooperatives and People's Handicrafts (Kopinkra) Pusako Minang City of Bukittinggi by the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of West Sumatra Province, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, 2021. Supervised by: Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP and M. Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA. This thesis consists of 151 pages with references to 20 books, 11 journals, 1 government document, 4 laws and regulations, and 4 internet websites.

In an effort to reduce the level of poverty in Indonesia, various policies have been made by the government through empowerment programs, one of which is for cooperatives. West Sumatra Province is one of the provinces that implements empowerment of cooperatives carried out by the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of West Sumatra Province and one of the target groups is Kopinkra Pusako Minang, Bukittinggi City. In the initial observations that the researchers made on the empowerment of the Kopinkra Pusako Minang City of Bukittinggi by the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of West Sumatra Province, there were several problems in the implementation of the cooperative empowerment program. So this study aims to see how the implementation of empowerment for Kopinkra Pusako Minang in Bukittinggi City is carried out by the Department of Cooperatives and SMEs of West Sumatra Province.

This research was conducted using qualitative methods and data collection techniques with interviews and documentation. While the data validity technique uses source triangulation. The theory used to analyze the implementation of this empowerment is Cho's theory with two main variables, namely structural empowerment and psychological empowerment to determine the implementation of empowerment.

The results showed that the empowerment of Kopinkra Pusako Minang in Bukittinggi City by the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of West Sumatra Province contained several aspects of cooperative empowerment according to the West Sumatra Regional Regulation number 16 of 2019 which were implemented, namely aspects of management, education and training, partnerships, and marketing. When viewed based on the variables in Cho's theory, there are several indicators that are not implemented. Based on the structural empowerment variable, it can be seen that there are still several indicators that have not been implemented, especially in the participation of Kopinkra Pusako Minang in Bukittinggi City. Then, based on the psychological empowerment variable, it can also be seen that several indicators have not been implemented, including the low competence of implementing activities, the lack of motivational activities for cooperatives, and there are something not give impacts from the empowerment activities carried out. Thus, based on Cho's theory, the implementation of cooperative empowerment based on regional regulation number 16 of 2019 has not gone well.

Keywords: Cooperative Empowerment, Kopinkra Pusako Minang Empowerment, Bukittinggi City

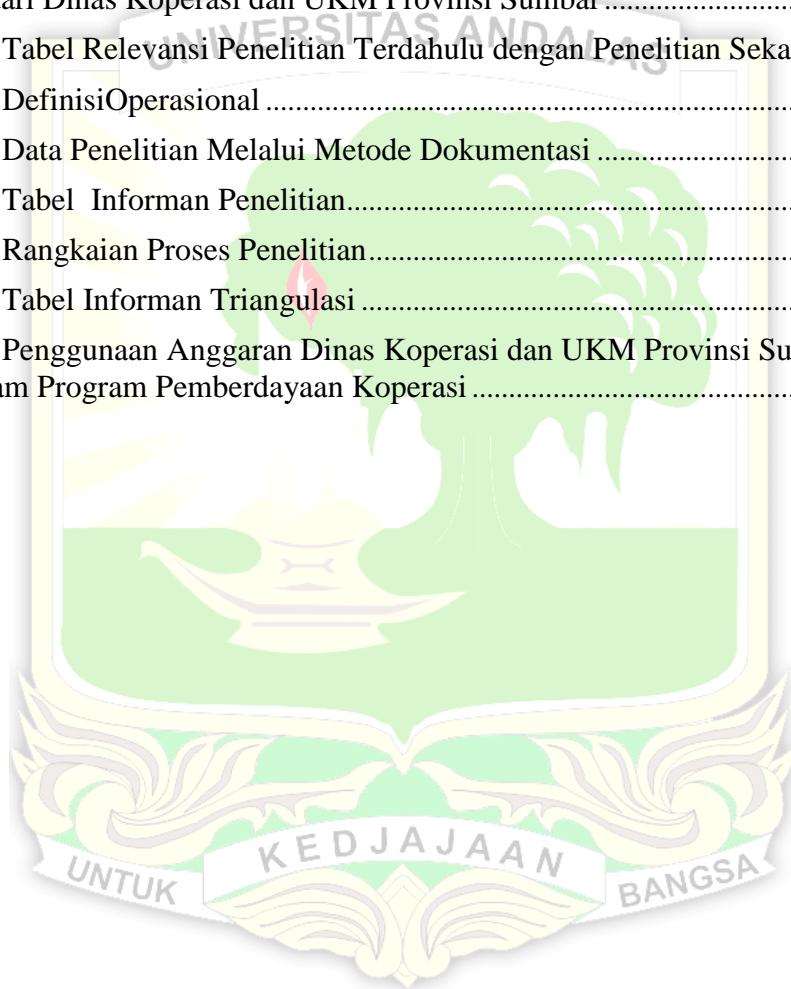
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19
1.4.1 Manfaat Teoritis	19
1.4.2 Manfaat Praktis	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	21
2.2 Konseptual dan Teori.....	28
2.2.1 Definisi Pemberdayaan	28
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan	31
2.2.3 Dimensi Pemberdayaan.....	32
2.3 Skema Pemikiran	41
2.4 Definisi Konsep	42
2.5 Definisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian	45
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.2.1 Wawancara	47
3.2.2 Dokumentasi.....	47
3.3 Teknik Pemilihan Informan	48
3.4 Peranan Peneliti	50
3.5 Proses Penelitian	50

3.6 Unit Analisis	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
3.8 Teknik Keabsahan Data	55
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	57
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.....	57
4.1.1 Profil.....	57
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	58
4.1.3 Struktur Organisasi.....	63
4.2 Profil Koperasi Industri dan Kerajinan (KOPINKRA) Pusako Minang Kota Bukittinggi	67
BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA.....	70
5.1. Aspek Manajemen	78
5.2 Aspek Pendidikan dan Pelatihan.....	100
5.3 Teknologi dan Informasi.....	117
5.4 Kemitraan.....	118
5.5 Bahan Baku	120
5.6 Produksi dan Pengolahan.....	121
5.7 Permodalan	123
5.8 Pemasaran	125
BAB VI PENUTUP	144
6.1 Kesimpulan	144
6.2 Saran	145
6.2.1 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.....	146
6.2.2 Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Koperasi	146
Daftar Pustaka	148

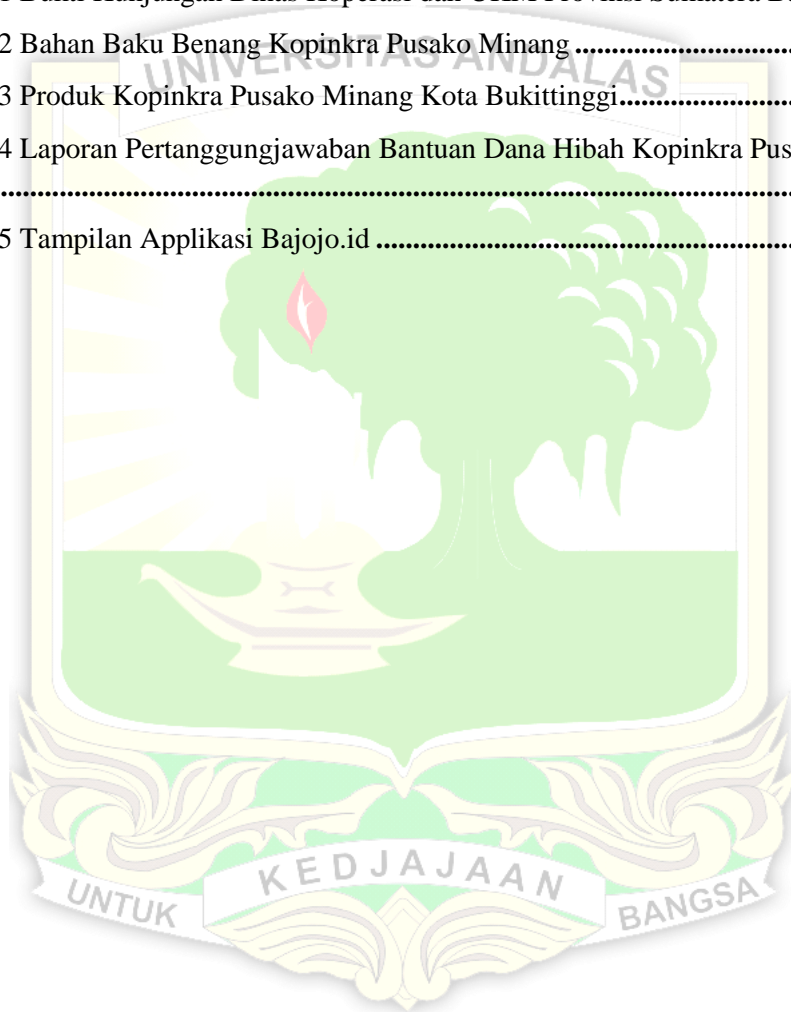
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Koperasi di Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2014-2020.....	7
Tabel 1.2 Anggaran Peningkatan Daya Saing Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018	12
Tabel 1.3 Daftar Koperasi Penerima Pembinaan Khusus Program <i>One Village One Product</i> dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar	15
Tabel 2.1 Tabel Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	24
Tabel 2.2 Definisi Operasional	43
Tabel 3.1 Data Penelitian Melalui Metode Dokumentasi	48
Tabel 3.2 Tabel Informan Penelitian.....	49
Tabel 3.3 Rangkaian Proses Penelitian.....	52
Tabel 3.4 Tabel Informan Triangulasi	56
Tabel 5.1 Penggunaan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam Program Pemberdayaan Koperasi	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat Pusako Minang Kota Bukittinggi..	16
Gambar 2.1 Skema Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	66
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi	69
Gambar 5.1 Bukti Kunjungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.....	88
Gambar 5.2 Bahan Baku Benang Kopinkra Pusako Minang	121
Gambar 5.3 Produk Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi.....	123
Gambar 5.4 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah Kopinkra Pusako Minang	125
Gambar 5.5 Tampilan Aplikasi Bajojo.id	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas.¹ Pengaruh kondisi jumlah penduduk yang mempunyai kualitas yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk yang mempunyai kualitas rendah akan menjadi beban dalam pembangunan.

Pada saat sekarang ini, di Indonesia sedang marak dilakukannya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat dilihat langsung oleh mata. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama.² Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak terlihat namun dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau disebut juga

¹ Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN hlm 11

² Kuncoro, Mudrajat. 2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta : Erlangga hlm 20

pembangunan masyarakat dan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan non fisik yang dilakukan berupa program-program pembangunan terhadap masyarakat untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang sedang marak dilakukan di Indonesia baik dari segi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik menimbulkan banyaknya ketidakmerataan pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu 27,55 juta jiwa atau sekitar 10,19% dari populasi penduduk Indonesia yang mana jumlah tersebut meningkat 2,76% dari tahun 2019.³ Terdapat dua hal yang menjadi fenomena pada masyarakat miskin dalam mempertahankan kehidupan yang layak. Pertama, pada sisi pengeluaran, masyarakat miskin akan melakukan penghematan pada pengeluaran yang dapat ditunda dan pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi sedapat mungkin dihindari. Kedua, pada sisi pendapatan, masyarakat miskin selalu memaksakan pengoptimalan dengan mengerahkan semua sumber daya ekonomi yang dimiliki. Namun, upaya ini tidak mampu mempertahankan masyarakat miskin untuk memperoleh tingkat kehidupan yang layak. Munculnya pelaksanaan ekonomi terbuka yang hanya dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, atau golongan yang lebih maju menimbulkan munculnya multi krisis yang merupakan beban masyarakat dan pemerintah yang sulit untuk diatasi persoalannya.

³<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> dikunjungi pada 7 Maret 2020

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut adalah dengan menerapkan prinsip koperasi ke dalam badan usaha yang dimiliki masyarakat dan memberdayakan koperasi sehingga mampu mempertahankan prinsip dan nilai koperasi. Stigma masyarakat yang menganggap koperasi merupakan organisasi yang masih jadul membuat penerapan nilai koperasi ke dalam badan usaha menjadi hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Karena apabila sebuah badan usaha dibangun sebagai suatu usaha bersama maka akan meminimalisir pemusatan pendapatan terhadap beberapa orang saja.⁴ Pada tahun 2020 dalam rapat kerja Kementerian Koperasi dan UKM bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, anggaran yang diterima Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Rp. 972,3 miliar. Dari jumlah tersebut anggaran yang disediakan untuk pemberdayaan koperasi hanya 3% dari jumlah anggaran tersebut dan jumlah tersebut dinilai terlalu kecil dan dianggap seperti tidak adanya kepedulian terhadap koperasi padahal di satu sisi koperasi merupakan penyokong perekonomian Indonesia.⁵ Kemudian menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, koperasi saat ini masih belum berkontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia hanya mencapai 5,1%. Kontribusi tersebut masih dinilai rendah terutama terlihat dari rendahnya partisipasi penduduk yang menjadi anggota koperasi yaitu 8,41% dan angka tersebut masih berada di bawah rata-rata angka

⁴Haryanti, Dewi Meisari. 2016. Koperasi dan Pemerataan Pembangunan. Research and Policy Insight FEB UI No 03 hal 1

⁵ <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1153095/anggaran-pemberdayaan-koperasi-terlalu-kecil/> diakses pada 22 Agustus 2021

global yaitu 16,31%.⁶ Sehingga, tingkat pemberdayaan koperasi masih dianggap terlalu rendah dan pemerintah menargetkan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap koperasi hingga tahun 2024. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan upaya koperasi tersebut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan lima poin penting arah kebijakan antara lain pemberdayaan koperasi pada sektor riil yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pengembangan klaster berdasarkan sentra komoditas dan wilayah, pemberdayaan lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan, pengembangan secara variatif sesuai karakteristik, serta modernisasi dan inovasi teknologi.⁷

Koperasi adalah sekumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.⁸ Koperasi sangat berperan penting dalam proses perbaikan ekonomi di suatu negara. Apabila koperasi mampu menjalankan prinsip dan nilainya secara ideal, maka proses perbaikan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan sesuai rencana. Dengan adanya koperasi, maka masyarakat dapat mengelola keuangannya secara mandiri dengan modal sosial yang mereka miliki. Oleh karena itu, koperasi dianggap akan berperan besar dalam membantu laju perekonomian negara.⁹

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia hingga tahun 2020 terdapat 127.124 unit koperasi aktif yang tersebar di

⁶ <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/79859/kontribusi-koperasi-terhadap-pdb-masih-rendah/> diakses pada 22 Agustus 2021

⁷ https://www.kompasiana.com/nkurniadi/5de3bda3d541df56580ad5e2/dorong-koperasi-dan-umkm-naik-kelas-ini-dia-5-arah-kebijakan-pemerintah?page=3&page_images=1

⁸Rudianto.2015. Akuntansi Manajemen. Jakarta : Erlangga hlm 3

⁹Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

seluruh Indonesia dan jumlah tersebut akan diprediksi bertambah dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya.¹⁰ Dengan jumlah besar tersebut, jangkauan koperasi ke desa seharusnya bisa signifikan dirasakan masyarakat mengingat Indonesia sendiri terdiri dari 83.931 desa yang tersebar di 514 kabupaten / kota di Indonesia.¹¹ Koperasi di setiap desa selayaknya mampu mengedepankan keunikan, ciri khas, dan produk unggulan yang berbeda-beda agar masyarakat yang memanfaatkan hasil produk daerah dapat meningkatkan perekonomian.

Namun, seiring berjalannya waktu masih banyak koperasi di daerah yang memiliki keterbatasan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi yang terjadi karena anggota koperasi masih belum memahami apa itu koperasi. Kemudian masih minimnya tingkat inovasi dan pengembangan produk koperasi sehingga produk koperasi tidak mampu bersaing dengan produk lain terutama produk impor. Dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam koperasi.¹² Kualitas sumber daya manusia masih terbilang belum siap untuk menghadapi persaingan global karena rendahnya jiwa kewirausahaan dan tidak mengerti prinsip serta nilai koperasi sehingga berakibat kepada rendahnya produktivitas koperasi. Kualitas SDM tersebut bahkan bisa menyebabkan koperasi tidak mampu berkembang atau bahkan bubar. Karena pengembangan koperasi tidak dapat dilepaskan dari

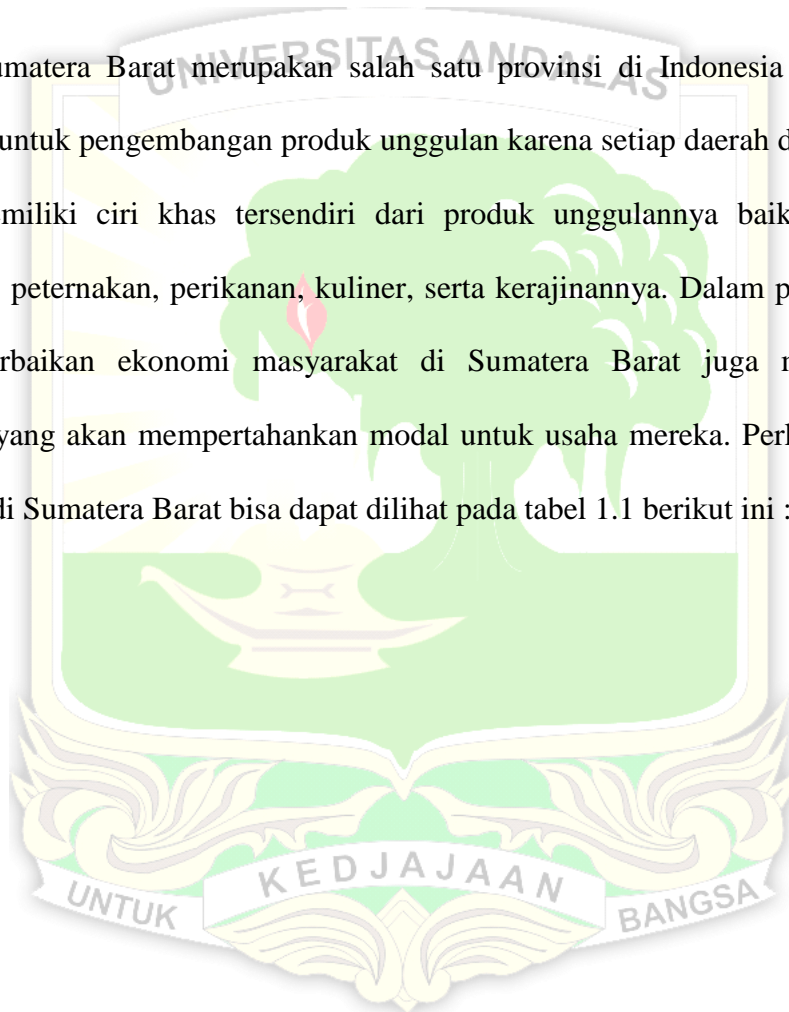
¹⁰<https://data.boks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020#:~:text=Jumlah%20koperasi%20di%20Indonesia%20mencapai%20127.124%20unit%20pada%202020>. Diakses pada 22 Agustus 2021

¹¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-di-indonesia> dikunjungi pada 14 Januari 2020

¹²Hanny, dkk. 2017. Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. Jurnal Akuntansi Vol 9 No 1 hal 56

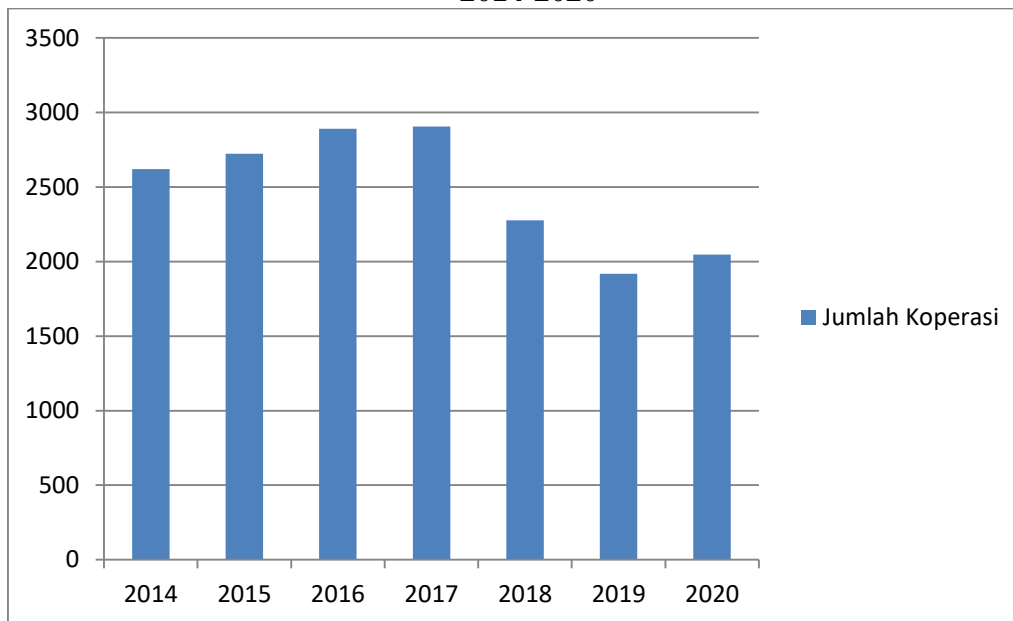
pengembangan dua pilar organisasi yaitu *human and system*. Sehingga walaupun sistem dalam sebuah koperasi sudah handal namun tidak diiringi dengan SDM yang handal juga, maka sistem tersebut tidak akan dapat berjalan dengan optimal.¹³ Permasalahan dalam pengembangan koperasi juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga potensial untuk pengembangan produk unggulan karena setiap daerah di Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri dari produk unggulannya baik dari segi pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, serta kerajinannya. Dalam peningkatan usaha perbaikan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat juga membentuk koperasi yang akan mempertahankan modal untuk usaha mereka. Perkembangan koperasi di Sumatera Barat bisa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :



¹³Haryanti, Dewi Meisari. OpCit hal 2

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Koperasi di Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2014-2020



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data perkembangan koperasi di Provinsi Sumatera Barat pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2017 jumlah koperasi di Sumatera Barat selalu meningkat. Pada tahun 2014 koperasi di Sumatera Barat berjumlah 2621 unit, 2015 berjumlah 2723 unit, dan 2016 berjumlah 2891 unit, dan pada tahun 2017 berjumlah 2905 unit. Namun, pada tahun 2018 jumlah koperasi di Sumatera Barat mengalami penurunan dengan jumlah yang besar hingga menjadi 2276 unit dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang tinggi menjadi 1919 unit. Penurunan jumlah koperasi tersebut disebabkan karena banyak koperasi yang mana pengurus dan anggotanya masih memiliki kompetensi yang rendah mengenai tugas dan fungsi dalam koperasi.

“...Permasalahan koperasi di Sumatera Barat saat ini adalah rendahnya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki koperasi terutama pengurus koperasi dalam hal kelembagaan. Sehingga koperasi menjadi sulit bersaing dan akhirnya banyak juga yang bubar...”¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat permasalahan utama dari pengembangan koperasi di Sumatera Barat terletak pada tingkat kompetensi anggota koperasi yang masih rendah terutama dalam hal kelembagaan. Hal tersebut terlihat dengan menurunnya jumlah koperasi di Sumatera Barat pada tahun 2019. Hingga pada tahun 2020, jumlah koperasi di Sumatera Barat kembali mengalami kenaikan menjadi 2047 unit. Dari jumlah tersebut masih banyak koperasi yang belum memiliki kelengkapan legalitasnya. Kemudian untuk mencegah hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berperan sentral untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dan telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan program pemberdayaan yang berkaitan dengan visi dan misi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tersebut dilaksanakan atas dasar kewenangan mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat itu sendiri.

¹⁴Wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 November 2019

Adapun visi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, berdaya saing tinggi, berorientasi pasar, dan berbasis sumber daya lokal. Sedangkan misi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu, pertama, Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi. Kedua, Meningkatkan kapasitas koperasi untuk mengelola potensi ekonomi serta usaha simpan pinjam. Ketiga, mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM.¹⁵ Dengan acuan visi dan misi yang mengarah kepada pemberdayaan koperasi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program-program pemberdayaan koperasi dengan dua program kerja yaitu GERMASKOP (Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi) dan Program *One Village One Product*.

“...Permasalahan yang kita temui untuk sebagian besar koperasi di Sumatera Barat antara lain pada partisipasi anggota koperasi yang masih rendah, kemudian keterbatasan anggaran untuk kegiatan, rendahnya kemampuan koperasi dalam memanfaatkan teknologi, dan masih sulitnya dalam meyakinkan koperasi untuk mau bermitra dengan beberapa lembaga keuangan. Walaupun demikian terdapat beberapa sisi positif yang dapat ditemui antara lain masih kuatnya nilai tradisional dan keunikan produk koperasi di Sumbar dan koperasi telah mampu menyediakan bahan baku untuk produksi produk bagi anggota koperasi...” (wawancara dengan Bapak Edwar pada 10 Juni 2021 pukul 11.49 WIB)

Terdapat beberapa permasalahan pada koperasi di Sumatera Barat yang mana beberapa permasalahan yang ditemui sama dengan permasalahan koperasi secara umum yaitu masih rendahnya partisipasi anggota koperasi untuk mengikuti

¹⁵ <http://diskopukm.sumbarprov.go.id/details/pages/8> diakses pada 1 Agustus 2021

kegiatan koperasi dan juga masih rendahnya kompetensi anggota koperasi mengenai nilai-nilai koperasi. Terbatasnya anggaran dalam pemberdayaan koperasi menyebabkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi hanya memfokuskan kegiatan dalam bentuk pelatihan. Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya kemampuan koperasi-koperasi dalam menggunakan teknologi terutama dalam hal penjualan produk sehingga masih sulit menjangkau pasar lokal dan global. Kemudian, belum adanya kemitraan bagi koperasi juga memberikan dampak bagi koperasi dalam menjaga kestabilan keuangan koperasi. Di samping beberapa permasalahan tersebut, terdapat beberapa nilai yang dapat diunggulkan dari koperasi-koperasi Sumatera Barat yaitu dalam hal penyediaan bahan baku produk yang mampu memenuhi kebutuhan anggota dan produksi produk koperasi yang masih menggunakan cara tradisional sehingga tidak menghilangkan ciri khas produk koperasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan pemberdayaan koperasi melalui beberapa kegiatan yang dirumuskan setiap tahunnya oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan koperasi menggunakan anggaran yang disediakan. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan wewenang yang mereka miliki yaitu pembinaan dan fasilitasi bidang koperasi serta UKM dalam lingkup provinsi dan kabupaten / kota yang mana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat nantinya akan berkoordinasi dengan dinas yang

membidangi koperasi dan UKM pada kabupaten / kota untuk memilih koperasi yang akan mengikuti kegiatan pemberdayaan.¹⁶ Selain itu, untuk mengatasi permasalahan koperasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merumuskan Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Perda tersebut merupakan peraturan yang menjadi landasan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pemberdayaan koperasi yang mana dalam melakukan pemberdayaan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat difokuskan kepada beberapa aspek yaitu manajemen, pendidikan dan pelatihan, teknologi dan informasi, kemitraan, bahan baku, produksi dan pengolahan, permodalan, dan pemasaran.¹⁷ Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan aspek pemberdayaan berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2019 tersebut antara lain :

1. Kunjungan koperasi
2. Pelatihan perkoperasian
3. Pelatihan kewirausahaan
4. Menjembatani pelaksanaan kerjasama dengan PT Taspen
5. Penyediaan sarana pemasaran
6. Perluasan jaringan pasar melalui peluncuran aplikasi bajojo.id

¹⁶ Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021

¹⁷ Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Kemudian, dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menetapkan 19 koperasi untuk menerima pemberdayaan dalam upaya peningkatan daya saing koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk 19 koperasi yang bergerak pada pengembangan produk unggulan daerah yang mana setiap kegiatan pemberdayaan tetap didasarkan kepada aspek-aspek yang terdapat pada Perda nomor 16 tahun 2019. Untuk melaksanakan pemberdayaan tersebut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar.¹⁸ Adapun jumlah anggaran untuk pemberdayaan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Anggaran Peningkatan Daya Saing Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2014	771.664.000,00	715.176.000,00	92,68
2	2015	759.576.000,00	664.078.100,00	87,43
3	2016	3.559.881.625,00	3.067.004.669,00	86,15
4	2017	3.874.168.900,00	3.455.000.497,00	89,18
5	2018	1.587.547.350,00	1.504.547.928,00	94,77
6	2019	1.736.090.153,00	1.584.841.787,00	91,29
7	2020	1.036.036.550,00	613.001.094,00	59,17

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2019

¹⁸Wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada 11 November 2019

Berdasarkan data anggaran pengembangan usaha koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada tabel 1.2, anggaran masih belum cukup untuk memberdayakan seluruh koperasi yang ada di Sumatera Barat terutama pada tahun 2014 dan 2015 ketika anggaran yang disediakan sangat kecil.

“...Permasalahan kami dalam pemberdayaan koperasi juga terletak pada anggaran yang disediakan. Jumlahnya masih bisa dibilang terbatas. Karena jumlah koperasi di Sumbar banyak, kami harus merencanakan anggaran agar pemberdayaan yang kami lakukan mampu menyentuh seluruh koperasi di Sumbar. Sehingga untuk mengatasi hal itu, kami tidak mau menggunakan anggaran dalam bentuk bantuan dana terhadap koperasi karena pasti setiap koperasi membutuhkan bantuan dan apabila kami berikan pada beberapa koperasi saja, itu akan bisa menimbulkan kecemburuan koperasi lain. Oleh karena itu, anggaran hanya kami gunakan untuk keperluan kegiatan pembinaan saja...”¹⁹

Kemudian, pada tahun 2020 tingginya angka jumlah koperasi yang memiliki NIK di Sumatera Barat dan semakin menurunnya jumlah anggaran yang disediakan membuat Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi harus mampu memanfaatkan anggaran dengan semaksimal mungkin. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan anggaran tersebut, Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab dalam pembinaan terhadap koperasi tidak pernah menggunakan anggaran tersebut dalam bentuk bantuan terhadap koperasi. Anggaran hanya digunakan dalam penyediaan hal-hal yang berkaitan dengan

¹⁹Wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 November 2019

kegiatan pembinaan terhadap koperasi. Tujuannya adalah untuk pemerataan anggaran agar semua koperasi dapat memperoleh pembinaan dan diberdayakan.

Selain itu, dalam rangka memberdayakan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melakukan inisiatif melalui berbagai program yang salah satunya adalah memperkenalkan *One Village One Product*. *One Village One Product* merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan koperasi yang bergerak pada bidang produk unggulan daerah di Sumatera Barat yang dimulai pada tahun 2014 melalui kesepakatan bersama dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota serta provinsi nomor 516/146.a/Diskop-PUK/2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan *One Village One Product* melalui Koperasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Surat Keputusan nomor 516-415-2014 yang mana ditetapkan 19 koperasi yang bergerak di bidang produk unggulan daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk menerima pembinaan khusus dalam upaya memberdayakan koperasi.²⁰ Adapun 19 koperasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

²⁰Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 516-415-2014 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan OVOP melalui Koperasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.3
Daftar Koperasi Penerima Pembinaan Khusus Program *One Village One Product* dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar

No	Kabupaten / Kota	Produk Unggulan	Koperasi
1	Kab. Agam	Sulaman	Aneka Sulaman
2	Kab. Pasaman	Ikan Air Tawar	Tigo Karya
3	Kab. Pasaman Barat	Jagung	Harapan Bersama
4	Kab. Lima Puluh Kota	Gambir	Durian Tinggi
5	Kab. Tanah Datar	Songket Pandai Sikek	Tenun Pandai Sikek
6	Kab. Padang Pariaman	Coklat	Padang Manih Sakato
7	Kab. Solok	Gulo Saka	ED-Tabek
8	Kab. Solok Selatan	Sawit dan Karet	Margi Laras
9	Kab. Sijunjung	Tenun Unggan	Songket Unggan
10	Kab. Dharmasraya	Batu Lumut Sungai Dareh	Kelompok Pengrajin Batu Lumut Sungai Dareh
11	Kab. Pesisir Selatan	Sulaman Bayang	Berlant Kreasi
12	Kab. Kepulauan Mentawai	Ikan Laut	Kinambela
13	Kota Padang	Rendang	Ikaboga
14	Kota Pariaman	Bordir	Rizki Bunda
15	Kota Padang Panjang	Kulit	Karmila
16	Kota Bukittinggi	Sepatu / Sandal	Sepatu Sandal Saiyo Sakato
17	Kota Payakumbuh	Rendang	IWAPI Kota Payakumbuh
18	Kota Solok	Minyak Atsiri	Ponpes Serambi Madinah
19	Kota Sawahlunto	Songket Silungkang	Kopinkra Silungkang

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang berorientasi kepada produk unggulan daerah yang dimulai pada tahun 2014 terus berlanjut. Hingga pada tahun 2017 ditunjuklah Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi untuk menjadi koperasi perwakilan Kota Bukittinggi

dalam menerima pemberdayaan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat bersama 18 koperasi lainnya.

Gambar 1.1
Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat Pusako Minang Kota Bukittinggi



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020

Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi (Gambar 1.1) merupakan sebuah koperasi yang bergerak di bidang kerajinan sulaman dan bordiran kerancang serta simpan pinjam yang memiliki 70 anggota yang terdiri dari pengrajin serta pengusaha sulaman dan bordiran. Koperasi yang sekarang diketuai oleh Hj Novita ini berdiri pada April 2011 dan telah memiliki badan hukum pada tahun 2012. Awalnya koperasi ini bergerak melalui iuran wajib anggota. Hingga pada tahun 2013 kopinkra mendapat bantuan dari Pemko Bukittinggi sebesar Rp 20 juta dan Rp 100 juta dari pemerintah pusat, Kopinkra Pusako Minang mulai melakukan pembenahan dan pindah kantor ke Banto Trade Center Kota Bukittinggi.

Kopinkra Pusako Minang berfokus kepada kerajinan sulaman dan bordiran kerancang yang mana Kopinkra Pusako Minang adalah sebagai penyedia bahan

baku untuk sulaman dan bordiran kerancang. Pada tahun 2019, Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi meraih peringkat I dalam Uji Petik Pengawasan Perkoperasian tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Hasil tersebut diperoleh setelah Kopinkra Pusako Minang mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Koperindag Kota Bukittinggi.²¹ Saat ini Kopinkra telah memiliki modal Rp 148 juta modal sekarang dan telah melakukan perputaran dana mencapai Rp 189 juta tanpa melibatkan pihak ketiga. Saat ini, bahan baku yang disediakan oleh Kopinkra Pusako Minang tidak lagi hanya untuk anggota koperasi tetapi juga disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan bahan baku.²²

Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, masih ditemukan beberapa kendala dalam pemberdayaan. Ketua Kopinkra mengaku masih sulit dalam menyalurkan kembali ilmu yang didapat ketika pembinaan di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi karena Dinas hanya mengundang ketua koperasi dan beberapa perwakilan saja.

“...Waktu pembinaan Program OVOP ketua dan beberapa anggota koperasi kami diundang untuk datang dalam pembinaan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar. Positifnya, karena pembinaan itu kami jadi mengerti nilai-nilai kelembagaan koperasi, bagaimana kami mengatur koperasi pun diajarkan. Namun, hambatan juga kami temui karena waktu pembinaan, kami kadang diajarkan inovasi produk sulaman, tapi karena kami hanya

²¹Surat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat nomor : 516/472/Was-Diskop/2019

²²<https://Bukittinggi.go.id/berita/ketua-dekranasda-kunjungi-dua-koperasi>. Dikunjungi pada 14 Januari 2020

beberapa orang yang diundang, ketika kembali ke koperasi kami kesulitan dalam menyalurkan ilmu yang kami dapat tadi kepada anggota koperasi lagi. Akhirnya, kami harus berinovasi sendiri lagi...”²³

Dari wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang diatas, Ketua Kopinkra mengakui adanya hal positif yang diperoleh dari pembinaan dan juga ada hambatan yang diperoleh setelah pembinaan. Untuk menutupi hambatan tersebut, ketua dan anggota koperasi harus berusaha untuk berinovasi kembali dengan produk yang dihasilkan dari Kopinkra Pusako Minang. Dampak positif dari pembinaan khusus yang diterima Kopinkra Pusako Minang terlihat pada kinerja koperasi. Pengurus dan anggota koperasi menjadi paham dengan nilai-nilai kelembagaan dan mulai mampu mengelola koperasi dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin lebih jauh menggambarkan apa saja hal-hal yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dalam mendorong setiap program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi terutama sehingga mampu meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap koperasi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

²³Wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang tanggal 22 Agustus 2018

“Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti telah peneliti rumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut : “Bagaimana pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya tentang pemberdayaan masyarakat dan mampu dijadikan bahan studi yang relevan untuk penelitian mahasiswa Administrasi Publik selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat bagi instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program yang mampu meningkatkan pemberdayaan terhadap semua masyarakat di Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan topik penelitian yang akan peneliti lakukan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Terkait dengan bahan rujukan dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengambil penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga dengan adanya penelitian terdahulu yang relevan ini, dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini nantinya.

Penelitian pertama yang menjadi rujukan adalah penelitian Oni Nugrianti dan Zulkarnaini yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Alokasi Dana”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari wawancara. Terdapat lima aspek yang dilihat dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan, inovasi, kepercayaan, *teamwork*, dan komunikasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dari aspek kepemimpinan sudah terlihat cukup baik, dari aspek inovasi sudah terlihat adanya inovasi namun masih dilaksanakan dengan setengah hati, dari aspek kepercayaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ADD masih rendah, dari aspek *teamwork* kerjasama dalam melaksanakan tugas dan

kerja masih belum maksimal, dan aspek komunikasi masih belum berjalan dengan baik.²⁴

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gunarianto dan Mulyono yang berjudul “Model Pengembangan *One Tambon One Product* dalam Upaya Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar untuk Memasuki Pasar Asean di Malang Raya”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan cluster sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey lapangan, *Participatory Research Appraisal* (PRA), *Focus Group Discussion* (FGD), dan seminar lokakarya. Terdapat tiga aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu aspek citra daerah, aspek budaya lokal, aspek reputasi daerah dari sudut pandang investor. Hasil penelitian adalah dari aspek citra daerah, Malang Raya adalah kota yang terkenal karena produk unggulannya seperti sayuran, ikan, grosiran, dan perdagangan campuran disamping sebagai kota pendidikan dan kota wisata sehingga kemampuan mendatangkan investor, pembeli, dan wisatawan perlu ditingkatkan. Dari aspek budaya lokal, Malang Raya dikenal dengan predikat masyarakat industri, pendidikan, perdagangan, jasa pariwisata, dan kekerabatan yang baik. Dari aspek reputasi daerah dari sudut pandang investor menunjukkan bahwa kondisi, kekayaan, dan lokasi alam Malang Raya sangat potensial sebagai daerah tujuan investasi. Peran instansi terkait dalam pemberdayaan sudah cukup

²⁴Nugrianti, Oni dan Zulkarnaini. 2013. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Alokasi Dana. Jurnal Kebijakan Publik vol 4 no. 1 hlm 87-92

baik walaupun terdapat beberapa kendala dan tantangan yang bisa diselesaikan karena membutuhkan komitmen dan kontribusi seluruh masyarakat setempat.²⁵

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Elvina Sari yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Ekonomi *Creative* (KECE) di Kampung Purnama Tunggal (Studi pada Dinas Perindustrian Lampung Tengah”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori tahap pemberdayaan oleh Wrihatnolo (tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan) dan teori fungsi manajemen oleh Terry (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dari aspek penyadaran, masyarakat termotivasi dengan semangat yang diberikan oleh kepala dinas dan camat setempat. Dari aspek pengkapasitasan, pihak dinas mengalami kendala karena sebagian peserta tidak memiliki basic menyulam. Dari aspek pendayaan, pihak dinas membantu memasarkan produk melalui pameran lokal dan nasional. Kemudian berdasarkan teori fungsi manajemen, diperoleh hasil yaitu, dari aspek perencanaan, pihak dinas melakukan perencanaan melalui rapat dengan staf dan pemerintah desa. Dari aspek pengorganisasian, panitia pelatihan berasal dari Dinas Perindustrian Lampung Tengah. Dari aspek pelaksanaan, pelatihan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 26 Agustus

²⁵Gunarianto dan Mulyono. 2018. *Model Pengembangan One Tambon One Product dalam Upaya Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar untuk Memasuki Pasar ASEAN di Malang Raya*. CIASTECH 2018 Universitas Widyagama Malang hlm 71-80

2017. Dan dari aspek pengawasan, pengawasan dilakukan oleh staf dinas setelah pelatihan dilaksanakan.²⁶

Dan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi.

Adapun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tabel Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Oni Nugrianti dan Zulkarnaini	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana	Kualitatif Deskriptif Dengan menggunakan teori efektivitas pemberdayaan Nyoman Sumaryadi yang terdiri dari aspek kepemimpinan, inovasi, kepercayaan, team work, komunikasi	Dari aspek kepemimpinan sudah terlihat cukup baik, dari aspek inovasi sudah terlihat adanya inovasi namun masih dilaksanakan dengan setengah hati, dari aspek kepercayaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ADD masih rendah, dari aspek team work kerja sama dalam melaksanakan tugas dan kerja masih belum maksimal, dan aspek komunikasi masih

²⁶Sari, Elvina. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Ekonomi Creative (KECE) di Kampung Purnama Tunggal (Studi pada Dinas Perindustrian Lampung Tengah)*. Skripsi Universitas Lampung

				belum berjalan dengan baik.
2.	Gunarianto dan Mulyono	Model Pengembangan <i>One Tambon One Product</i> dalam Upaya Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar untuk Memasuki Pasar Asean di Malang Raya	Kualitatif Deskriptif dengan menganalisis tiga aspek yaitu aspek citra daerah, aspek budaya lokal, aspek reputasi daerah dari sudut pandang investor	Dari aspek citra daerah, Malang Raya adalah kota yang terkenal karena produk unggulannya seperti sayuran, ikan, grosiran, dan perdagangan campuran disamping sebagai kota pendidikan dan kota wisata sehingga kemampuan mendatangkan investor, pembeli, dan wisatawan perlu ditingkatkan. Dari aspek budaya lokal, Malang Raya dikenal dengan predikat masyarakat industri, pendidikan, perdagangan, jasa pariwisata, dan kekerabatan yang baik. Dari aspek reputasi daerah dari sudut pandang investor menunjukkan bahwa kondisi, kekayaan, dan lokasi alam Malang Raya sangat potensial sebagai daerah tujuan investasi. Peran instansi terkait dalam pemberdayaan sudah cukup baik walaupun terdapat beberapa

				kendala dan tantangan yang bisa diselesaikan karena membutuhkan komitmen dan kontribusi seluruh masyarakat setempat
3.	Elvina Sari	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Ekonomi Creative (KECE) di Kampung Purnama Tunggal (Studi pada Dinas Perindustrian Lampung Tengah	Kualitatif	Dari aspek penyadaran, masyarakat termotivasi dengan semangat yang diberikan oleh kepala dinas dan camat setempat. Dari aspek pengkapasitasan, pihak dinas mengalami kendala karena sebagian peserta tidak memiliki basic menyulam. Dari aspek pendayaan, pihak dinas membantu memasarkan produk melalui pameran lokal dan nasional. Kemudian berdasarkan teori fungsi manajemen, diperoleh hasil yaitu, dari aspek perencanaan, pihak dinas melakukan perencanaan melalui rapat dengan staf dan pemerintah desa. Dari aspek pengorganisasian, panitia pelatihan berasal dari Dinas Perindustrian Lampung Tengah. Dari aspek pelaksanaan, pelatihan dilakukan pada tanggal 24 Agustus

				2017 sampai dengan 26 Agustus 2017. Dan dari aspek pengawasan, pengawasan dilakukan oleh staf dinas setelah pelatihan dilaksanakan.
4.	Rahmattul Mahgribi	Pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan aspek kegiatan pemberdayaan koperasi berdasarkan Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 yang dianalisis berdasarkan variabel pada teori Cho dapat dilihat bahwa indikator pada aspek pemberdayaan struktural belum berjalan dengan maksimal terutama pada aspek penglibatan koperasi yang merupakan sasaran kegiatan. Kemudian indikator yang terdapat pada variabel pemberdayaan psikologis juga belum berjalan maksimal terutama pada kompetensi dinas yang masih rendah terkait

				penyediaan sarana pemasaran dan masih terdapatnya beberapa dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang didasarkan kepada aspek pemberdayaan dalam perda tersebut
--	--	--	--	---

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2019

2.2 Konseptual dan Teori

2.2.1 Definisi Pemberdayaan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kemampuan / kekuatan, dan atau proses pemberian kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Proses pemberdayaan merujuk kepada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi suatu kelompok orang yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, perilaku sadar, dan keterampilan yang baik. Berdasarkan Permendagri RI nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁷

Menurut Prijono dan Pranarka pemberdayaan mengandung dua arti. Pertama, *to give power or authority*. Kedua, *to give to or enable*. Pemaknaan pertama meliputi pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang / belum berdaya. Pemaknaan kedua berkaitan dengan pemberian kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.²⁸ Sedangkan menurut Sumodiningrat, pemberdayaan merupakan istilah yang khas Indonesia daripada barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi daya bukan kekuasaan. Pendapat Sumodiningrat bertolak belakang dengan pendapat Prijono dan Pranarka. Istilah yang paling tepat adalah *energize* atau memberikan energi. Pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.²⁹

Selain itu, menurut Mulyawan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses motivasi dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi melalui partisipasi, demokratisasi, pembelajaran, serta pengalaman sosial dan tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan

²⁷Permendagri RI nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

²⁸Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka. 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : CSIS hlm 77

²⁹Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta : Gramedia hlm 72

martabat masyarakat dari kondisi yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai kehidupannya.³⁰

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut dapat dipahami bahwa untuk konteks barat disebut *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan karena konsep pemberdayaan di barat lahir dari suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Akar dari pemahaman yang diperoleh dalam penyimpulan beberapa pendapat ini adalah :

- 1) Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
- 2) Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.³¹

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan

³⁰Mulyawan, Rahman. 2016. Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan. Bandung : UNPAD Press hlm 65-66

³¹Winarni, Tri. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong abad 21 : Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta : Aditya Media hlm 75-76

kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.³² Sehingga nantinya dicapai masyarakat yang berdaya dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
- 2) Mampu mengarahkan dirinya sendiri
- 3) Memiliki kekuatan untuk berunding
- 4) Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama
- 5) Bertanggung jawab atas tindakannya.³³

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Monawar tujuan dari pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas, guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.³⁴

³²Suparjan dan Hemptri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat dari Pengembangan sampai Pemberdayaan. Yogyakarta : Aditya Media hlm 58-60

³³Sumardjo. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Provinsi Jawa Barat (Desertasi). Bogor : Program Pascasarjana IPB

³⁴Monawar, Noor. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS volume I no 2 hlm 90

Kemudian, menurut Sumaryadi dalam Mulyawan, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk :³⁵

- 1) Membantu pengembangan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil.
- 2) Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup serta mampu ikut serta dalam pengembangan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari adanya pemberdayaan adalah untuk membentuk individu serta masyarakat menjadi mandiri dari segi pemikiran, tindakan, dan pengendalian terhadap setiap aktivitas yang dilakukan serta berkaitan erat dengan kemampuan kognitif (berfikir), konatif (berperilaku), dan afektif (berperasaan).

2.2.3 Dimensi Pemberdayaan

Menurut Suharto, pemberdayaan memiliki lima dimensi yaitu :³⁶

- 1) *Enabling*

Enabling adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat struktural dan budaya yang menghambat.

³⁵Mulyawan, OpCit hlm 71

³⁶Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama hlm 205

2) *Empowering*

Empowering adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga pemberdayaan harus mampu mengembangkan kemampuan dan percaya diri yang dimiliki masyarakat.

3) *Protecting*

Protecting adalah melindungi masyarakat terutama masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat kuat, menghindari persaingan tidak seimbang, dan mencegah eksploitasi. Pemberdayaan harus diarahkan untuk menghapuskan segala diskriminasi yang merugikan masyarakat lemah. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas, dan masyarakat terasing.

4) *Supporting*

Supporting adalah pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak jatuh dalam kondisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5) *Fostering*

Fostering adalah memelihara kondisi kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Sedangkan menurut Kartasasmita, upaya dalam memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga hal, yaitu :³⁷

1) *Enabling*

Enabling merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk berkembang. Dasar pemikirannya yaitu bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan karena apabila masyarakat tidak memiliki daya, maka akan menyebabkan kepunahan.

2) *Empowering*

Empowering berarti memperkuat potensi, daya serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah positif selain penciptaan suasana yang kondusif.

3) *Protecting*

Protecting mengandung arti melindungi masyarakat lemah untuk mencegah terjadinya yang lemah menjadi semakin lemah karena kurang berdaya dalam bersaing dengan yang kuat. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat lemah adalah hal yang mendasar.

Kemudian, menurut Effendy dimensi pemberdayaan memiliki tiga aspek, yaitu :³⁸

³⁷Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES hlm 159-160

1) *Enabling*

Enabling diartikan sebagai tercapainya iklim yang mampu mendorong potensi masyarakat untuk berkembang agar masyarakat mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.

2) *Empowering*

Empowering diartikan sebagai potensi yang dimiliki masyarakat diperkuat lagi. Pendekatan yang digunakan adalah dengan meningkatkan *skill* dan kemampuan manajerial

3) *Maintaning*

Maintaning merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, dimana adanya perlindungan terhadap masyarakat lemah agar persaingan dapat terbentuk secara sehat.

Dimensi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kartasasmita dan Effendy memiliki konsep yang sama. Akan tetapi, ada perbedaan pada dimensi yang ketiga yaitu *protecting* dan *maintaning*. Namun kedua konsep dimensi tersebut sama-sama melihat pemberdayaan dari sisi perlindungan terhadap masyarakat yang lemah.

³⁸Mulyawan. OpCit hlm 66-67

Menurut Cho *et. al.* Pemberdayaan dapat dilihat dari dua aspek dimensi yaitu :³⁹

1) *Structural Empowerment*

Structural Empowerment (Pemberdayaan struktural) berkaitan dengan perancangan ulang struktur atau praktik manajemen dalam bentuk pendistribusian tanggung jawab dan informasi sehingga memungkinkan semua pihak bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan struktural dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

- *Participative Decision Making (PDM)*

Participative Decision Making (Partisipasi dalam pengambilan keputusan) berkaitan dengan proses manajemen yang mengalokasikan kekuasaan dan wewenang kepada karyawan melalui partisipasi karyawan di mana keputusan dalam organisasi diterima oleh orang-orang yang akan melaksanakan keputusan tersebut. Sehingga PDM dikaitkan dengan keterlibatan langsung para pemangku kepentingan serta saling menghormati pihak lain dalam suatu organisasi.

- *Feedback on Performance*

Feedback on performance (umpan balik kinerja) didefinisikan sebagai informasi tentang kinerja atau tindakan dalam organisasi untuk mengontrol tindakan organisasi di masa depan atau pertukaran informasi dari atasan kepada

³⁹Cho, Taejun dan Faerman, Sue R. 2009. *An Integrative Approach to Empowerment : Construct Definition, Measurement, and Validation*. Public Management Review. hlm 32-51

bawahan. Sehingga, umpan balik dipandang sebagai praktik manajemen karena bawahan memperoleh informasi mengenai kegiatan organisasi dari atasan.

- Delegation

Delegation (delegasi) berkaitan dengan proses yang memungkinkan adanya hierarki dalam organisasi untuk membuat keputusan dan berkaitan dengan penugasan tanggung jawab baru dan wewenang tambahan.

2) *Psychological Empowerment*

Psychological Empowerment (Pemberdayaan psikologis) memiliki definisi bahwa dalam pemberdayaan, setiap individu memiliki kemungkinan di dalam dirinya yang agak menekankan kepada intervensi manajemen, pelatihan, dan pemberian motivasi. Pada pemberdayaan psikologis manajemen tidak dilakukan terhadap karyawan namun kepada pola pikir karyawan tentang peran mereka dalam organisasi dengan mempertimbangkan kognitif individu. Pemberdayaan psikologis dapat dilihat dari empat aspek, yaitu :

- Meaning

Meaning (Makna) berkaitan dengan kebermaknaan pekerjaan yang dilakukan. Secara khusus, hal ini didefinisikan sebagai kesesuaian antara sistem nilai seseorang dengan sasaran aktivitas dalam pekerjaan yang berpengaruh kepada peningkatan komitmen, kepuasan, dan kinerja.

- *Competence*

Competence (Kompetensi) berkaitan dengan sejauh mana karyawan mengetahui dan memahami pekerjaan yang dia lakukan karena setiap individu akan mampu melakukan tugas yang baik dengan kemampuan yang memiliki keterampilan. Kompetensi akan mampu mengurangi stres dan ketegangan.

- *Self Determination*

Self Determination (Penentuan nasib sendiri) berkaitan dengan keyakinan dalam diri individu bahwa ia memiliki kebebasan dan otonomi dalam mempengaruhi perilakunya ketika bekerja. Penentuan nasib juga berkaitan dengan kemandirian individu dan keleluasaan dalam proses manajemen. Kebebasan tersebut mampu meningkatkan kepuasan dan efektifitas kerja.

- *Impact*

Impact (Dampak) berkaitan dengan keyakinan individu bahwa ia memiliki sedikit kendali lebih dari hasil dan mampu mempengaruhi organisasi. Dampak juga berkaitan dengan kontrol atas seluruh pekerjaan dan hasilnya, inisiatif, dan inovasi nyata.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai dimensi pemberdayaan, dalam penelitian ini, dimensi pemberdayaan yang akan peneliti gunakan adalah teori Pemberdayaan Menurut Cho dan Faerman yaitu, *Structural Empowerment* dan *Psychological Empowerment*.

Alasan peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Cho dan Faerman adalah karena indikator-indikator yang terdapat pada teori pemberdayaan Cho dan Faerman dapat menjelaskan permasalahan dan fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Pertama dari aspek *Structural Empowerment* yang berkaitan dengan praktik manajemen dalam pendistribusian wewenang. Aspek ini terdiri dari aspek *Participative Decision Making* (Partisipasi dalam pengambilan keputusan) yang berkaitan dengan penglibatan semua pihak dalam melaksanakan pembinaan khusus untuk pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang, aspek *Feedback on Performance* (Umpan balik kinerja) yang berkaitan dengan umpan balik yang dilakukan Kopinkra Pusako Minang setelah menerima pembinaan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perkoperasian, dan aspek *Delegation* (Delegasi) yang berkaitan dengan proses pendistribusian wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang serta kepada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap Kopinkra Pusako Minang.

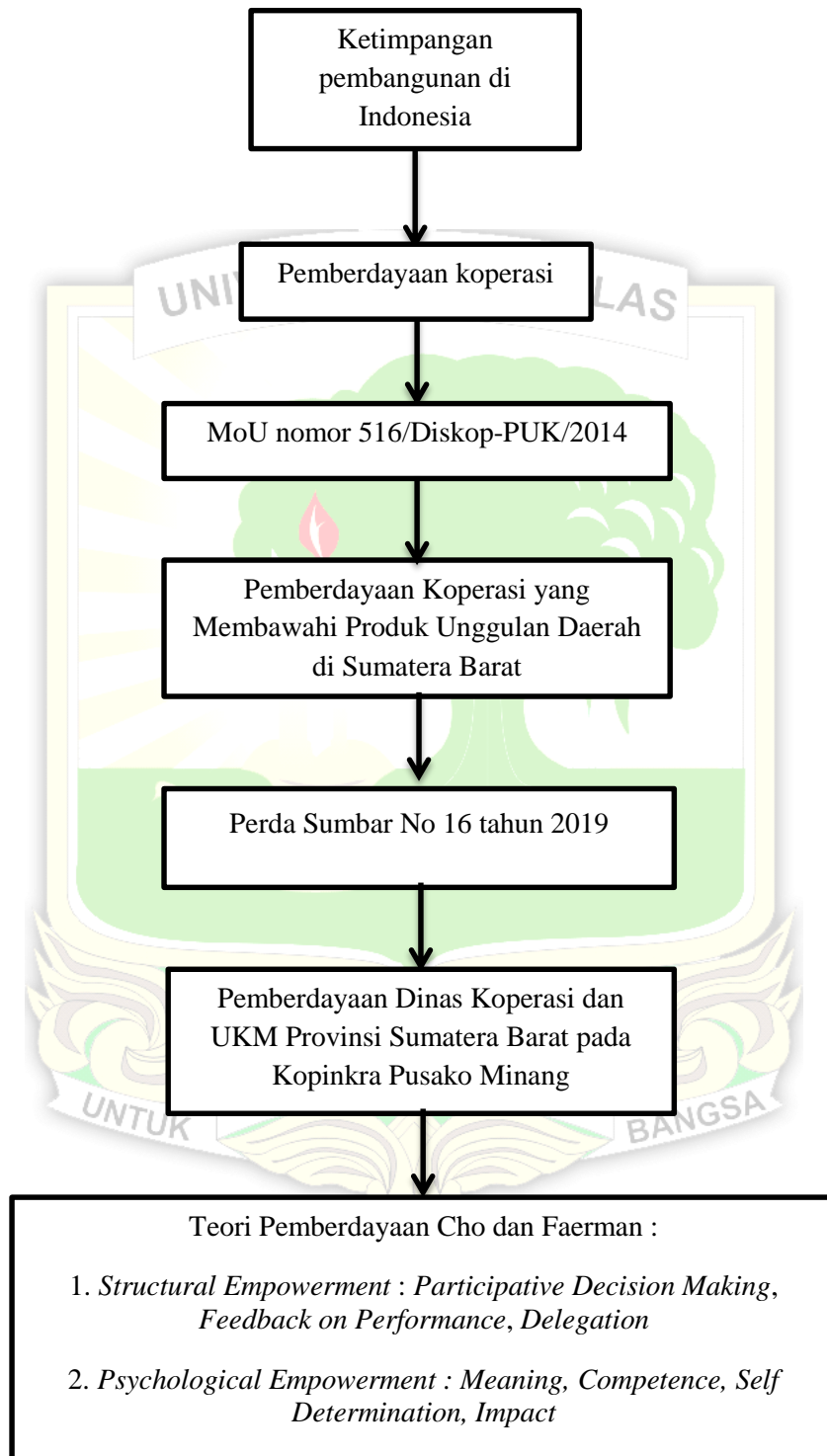
Kedua, dari aspek *Psychological Empowerment* yang berkaitan dengan pengembangan dalam diri baik individu maupun kelompok. Aspek ini terdiri dari aspek *Meaning* (makna) yang berkaitan dengan kesesuaian pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan kinerja yang dilakukan oleh Kopinkra Pusako Minang, aspek *Competence* (Kompetensi) yang

berkaitan dengan pengetahuan mengenai nilai dan prinsip koperasi, aspek *Self Determination* (Penentuan nasib sendiri) yang berkaitan dengan inovasi yang dilakukan Kopinkra Pusako Minang terhadap produk yang dihasilkan, dan aspek *Impact* (Dampak) yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh oleh Kopinkra Pusako Minang setelah diberikan pembinaan khusus dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.



2.3 Skema Pemikiran

Gambar 2.1
Skema Pemikiran



2.4 Definisi Konsep

- 1) Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kemampuan / kekuatan, dan atau proses pemberian kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum memiliki daya. Proses pemberdayaan merujuk kepada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi suatu kelompok orang yang lemah, baik dari segi pengetahuan, perilaku, maupun pelatihan (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, perilaku sadar, dan keterampilan yang baik.
- 2) Koperasi adalah sekumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri dan membentuk sebuah organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang dikelola secara demokratis.

2.5 Definisi Operasional

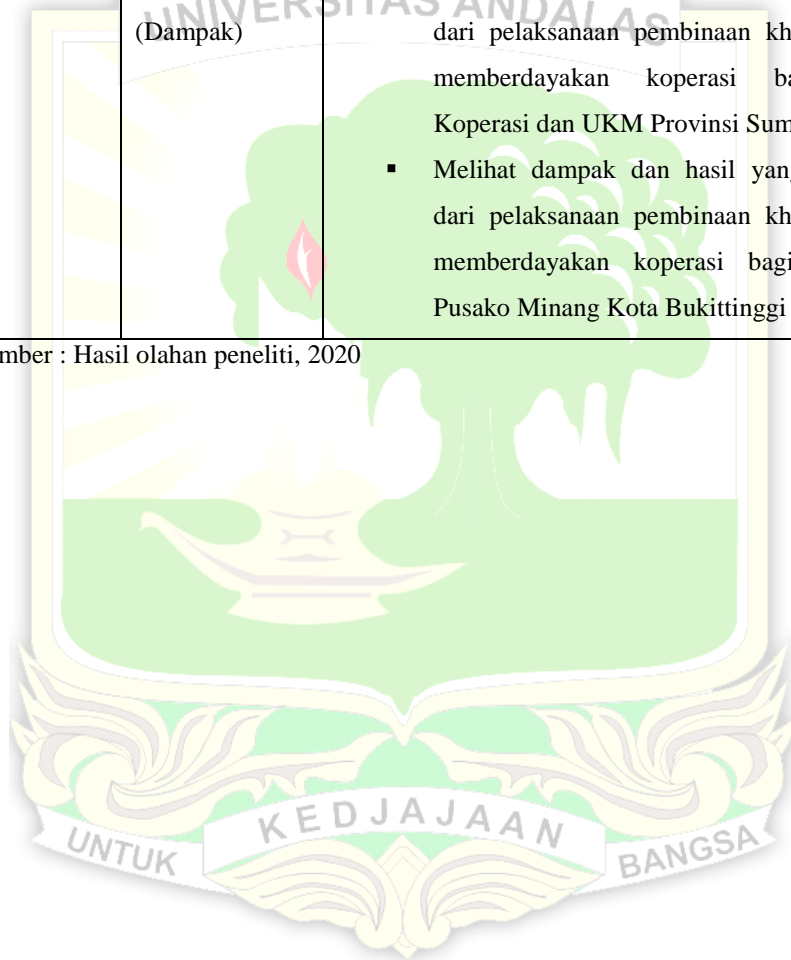
Dari definisi di atas peneliti akan menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Cho dan Faerman dengan indikator yang digunakan dijabarkan dalam Tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Cara Mengukur
<i>Structural Empowerment</i> (Pemberdayaan Struktural)	<i>Participative Decision Making</i> (Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melihat sejauh mana penglibatan semua pihak oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang ▪ Melihat penglibatan bidang lain pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi ▪ Melihat bentuk akses yang diperoleh Kopinkra Pusako Minang kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
	<i>Feedback on Performance</i> (Umpan Balik Kinerja)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melihat penggunaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang ▪ Melihat hal-hal apa saja yang telah dilaksanakan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi setelah menerima kegiatan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
	<i>Delegation</i> (Delegasi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melihat distribusi kewenangan yang dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang
<i>Psychological Empowerment</i> (Pemberdayaan Psikologis)	<i>Meaning</i> (Makna)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melihat penyampaian informasi yang diterima oleh Kopinkra Pusako Minang dengan pembinaan yang telah diberikan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
	<i>Competence</i> (Kompetensi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melihat spesialisasi dan kapasitas yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang

	<p><i>Self Determination</i> (Penentuan Nasib Sendiri)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melihat cara yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam menumbuhkan sikap inovasi dan kreasi Kopinkra Pusako Minang terhadap produk yang dihasilkan ▪ Melihat bentuk inovasi dan kreasi yang dilakukan oleh Kopinkra Pusako Minang terhadap produk yang dihasilkan
	<p><i>Impact</i> (Dampak)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melihat dampak dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembinaan khusus dalam memberdayakan koperasi bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ▪ Melihat dampak dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembinaan khusus dalam memberdayakan koperasi bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dibanding generalisasi.⁴⁰ Sedangkan, menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena secara apa adanya sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan tanpa melebihkan ataupun mengurangkan.⁴¹

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena topik dalam penelitian peneliti yaitu Pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh mengenai bagaimana pelaksanaan pemberdayaan pemberdayaan terhadap Kopinkra Pusako Minang

⁴⁰Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta hlm 15

⁴¹Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja hlm 60

Kota Bukittinggi tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh David William bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah.⁴²

Selain itu, tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara menyeluruh. Tipe penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini disebabkan peneliti mendeskripsikan secara menyeluruh pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam metode ilmiah karena data yang dikumpulkan akan digunakan dalam analisis penelitian. Pengumpulan data tersebut harus melalui prosedur yang sistematis serta terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴³

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

⁴² Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Jakarta, 2014. Hlm 5

⁴³ Pasolong. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung. Hlm 130

3.2.1 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab sehingga dapat diperoleh makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁴ Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana peneliti dapat merumuskan sendiri tentang masalah dan pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah lengkap dan tersusun secara sistematis.⁴⁵

Alasan peneliti menggunakan wawancara terstruktur adalah karena peneliti telah merumuskan apa yang peneliti tanyakan terkait masalah pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

3.2.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi digunakan untuk pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan menjadi semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan karya seni yang telah ada.⁴⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berkas-berkas serta dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota

⁴⁴Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta hlm 72

⁴⁵ Singarimbun. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta, 1989. hlm 192

⁴⁶ Ibid. Hlm 240

Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat baik berupa peraturan, foto, surat keputusan, dan lain-lain. Berikut data penelitian yang peneliti dapatkan melalui dokumentasi :

Tabel 3.1
Data Penelitian Melalui Metode Dokumentasi

No	Data	Sumber Data
1	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 516 – 484 – 2017	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
2	Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 57 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi	https://jdih.birohukum.sumbarprov.go.id/detail/peraturan/448/
3	Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 98 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/74055/pegub-prov-sumatera-barat-no-98-tahun-2017/
4	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 516 – 415 – 2014	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
5	Perda Sumbar no 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil	http://jdih.birohukum.sumbarprov.go.id/detail/peraturan/626/

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

3.3 Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya sendiri maupun orang lain ataupun suatu kejadian kepada peneliti. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah pemilihan informan penelitian dengan pertimbangan tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh bisa lebih

representatif.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan peneliti untuk pemilihan informan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini adalah peran dan pengetahuan dari orang tersebut dalam pelaksanaan pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka informan yang peneliti libatkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Alasan
1.	Ir. Zirna Yusri	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Informan merupakan pejabat tertinggi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
2.	Dina Febriyanti, SE, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Informan merupakan kepala bidang pemberdayaan koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan memegang seluruh pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi
3.	Edwar, SH	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan	Karena merupakan informan rekomendasi dari informan sebelumnya
4.	Ir. Nasrizal, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Karena merupakan pengelola sarana pemasaran produk koperasi
5.	Donny Ubani, SE, MM	Kepala UPTD Balai Pelatihan Koperasi	Karena merupakan unit koordinasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan setiap kegiatan pelatihan bagi koperasi
6.	Ir. Zulhendi	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Informan merupakan penanggung jawab peningkatan kualitas anggota koperasi
7.	Ira Hayati ST, M.Si	Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Karena merupakan informan rekomendasi dari informan sebelumnya

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

⁴⁷Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta hlm 122

3.4 Peranan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Hal ini disebabkan peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data di lapangan. Fungsi peneliti disini adalah menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menginterpretasikan data, melakukan analisis data, dan membuat kesimpulan atas temuan yang ada di lapangan agar memperoleh data yang konkrit.

3.5 Proses Penelitian

Penelitian ini diawali dengan ketertarikan peneliti terhadap pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Sebelum dilakukan observasi awal peneliti melakukan pengumpulan data terlebih dahulu mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kemudian peneliti melakukan observasi awal dengan mengumpulkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama terhadap Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Alasan peneliti memilih koperasi tersebut adalah karena Kopinkra Pusako Minang merupakan peringkat 1 dalam uji petik pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Pada survei awal yang peneliti lakukan pada Februari 2020 peneliti menemukan fakta bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Sumatera Barat. Beberapa fenomena yang peneliti peroleh yaitu masih terbatasnya anggaran pemberdayaan koperasi dan rendahnya pengetahuan anggota koperasi di Sumatera Barat sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan teori pemberdayaan Cho untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ini.

Setelah proposal penelitian yang peneliti ajukan lulus ujian seminar pada Bulan Juni, peneliti mengurus izin penelitian untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai pelaksanaan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama terhadap Kopinkra Pusako Minang. Penelitian yang peneliti lakukan sempat terhenti karena adanya pandemi Covid-19 sehingga diberlakukannya PSBB yang menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan turun lapangan dalam mengumpulkan data. Selama PSBB tersebut peneliti berusaha mengumpulkan data berupa referensi terkait pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, setelah diberhentikannya masa PSBB dan diberlakukannya *new normal* peneliti langsung mengurus surat izin penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang merupakan informan kunci dan informan triangulasi. Wawancara yang peneliti lakukan berupa wawancara langsung. Selengkapya, secara kronologis dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3..3
Rangkaian Proses Penelitian

Hari / Tanggal	Kegiatan	Keterangan
Senin 28 September 2020	Mengurus surat izin observasi awal	Bagian Akademik FISIP UNAND
Selasa 29 September 2020	Mengurus surat izin penelitian	Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat
Kamis 1 Oktober 2020	Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat (Bapak Ir. Zirma Yusri)	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
Senin 5 Oktober 2020	Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumbar (Ibu Dina Febriyanti SE, M.Si)	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
Senin 5 Oktober 2020	Wawancara dengan seksi pengembangan SDM Dinas Koperasi dan UKM Sumbar (Bapak Ir. Zuhlendi)	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
Rabu 7 Oktober 2020	Mengurus surat izin penelitian	Bagian Akademik FISIP UNAND
Kamis 8 Oktober 2020	Mengurus surat izin penelitian	Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi
Selasa 13 Oktober 2020	Wawancara dengan Kepala Diskoperindag Kota Bukittinggi (Bapak M. Idris)	Kantor Diskoperindag Kota Bukittinggi
Sabtu 17 Oktober 2020	Wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang (Ibu Hj. Novita)	Wawancara melalui telepon
Jumat 4 Juni 2021	Mengurus Surat izin penelitian	Bagian Akademik FISIP UNAND
Senin 7 Juni 2021	Mengurus surat izin penelitian	Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat
Kamis 10 Juni 2021	Wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan (Bapak Edwar SH)	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
Kamis 22 Juni 2021	Wawancara dengan Kepala UPTD Balatkop Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat (Bapak Donni Ubani)	Wawancara melalui telepon
Kamis 22 Juli 2021	Wawancara dengan Kepala UPTD Balatkop Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat (Bapak Donni Ubani)	Wawancara melalui telepon
Jumat 13 Agustus 2021	Wawancara dengan Ketua Kopinka Pusako Minang (Ibu Hj. Novita)	Kopinkra Pusako Minang
Rabu 18 Agustus 2021	Wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi (Ira Heti ST, M.Si)	Wawancara melalui telepon
Minggu 24 Agustus 2021	Wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang (Ibu Desi Arisandi)	Wawancara melalui telepon
Senin 25 Agustus 2021	Wawancara dengan salah satu anggota koperasi (Ibu Yet)	Wawancara melalui telepon
Minggu	Wawancara dengan Kepala Bidang	Wawancara melalui

5 September 2021	Pemberdayaan Koperasi (Ibu Dina Febriyanti)	telepon
Senin 13 September 2021	Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat (Bapak Ir. Zirna Yusri)	Wawancara melalui telepon
Selasa 5 Oktober 2021	Wawancara dengan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi (Bapak Ir. Zulhendi)	Wawancara melalui telepon
Minggu 10 Oktober 2021	Wawancara dengan Bendahara Kopinkra Pusako Minang (Ibu Hj Ismawati)	Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi
Minggu 10 Oktober 2021	Wawancara dengan Unit Bahan Baku Kopinkra Pusako Minang (Ibu Herlina)	Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

3.6 Unit Analisis

Unit analisis adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah dalam penelitian.⁴⁸ Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil atau terbatas.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yang mana dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan program pemberdayaan koperasi. Alasan pemilihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai unit analisis karena pelaksanaan setiap kegiatan dalam program pemberdayaan terhadap koperasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, seluruh pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi menggunakan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

⁴⁸Zulganef. 2008. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta : Graha Ilmu

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap apa yang dikemukakan.⁴⁹ Adapun cara yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut yakni menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini peneliti mencari serta mengumpulkan seluruh data terkait pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat baik dari wawancara dengan informan serta kelompok sasaran yaitu Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data terkait pelaksanaan pemberdayaan koperasi dari internet serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

2. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data pada pelaksanaan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi peneliti melakukan analisis dengan cara merangkum, mengklasifikasikan, memilih, serta memfokuskan pada hal penting agar data tersebut memberikan gambaran yang jelas.

⁴⁹Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya hlm 248

3. Penyajian data

Pada tahap ini peneliti memaparkan informasi-informasi terkait yang telah tersusun secara sistematis dan memberikan penarikan kesimpulan mengenai pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

4. Penarikan Kesimpulan Verifikasi

Dalam tahap verifikasi ini, peneliti mencoba menginterpretasikan kembali data secara terus menerus mengenai pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian Kualitatif keabsahan data sangatlah penting karena penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Melalui keabsahan data kredibilitas, penelitian kualitatif akan dapat tercapai. Sehingga, untuk mendapatkan keabsahan data tersebut dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu dengan tujuan untuk pengecekan atau bahan perbandingan terhadap data yang diperoleh.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah suatu kegiatan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat dari waktu dan alat yang

⁵⁰Moleong, Lexy J. 2010. *Ibid*

berbeda pada penelitian kualitatif. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan berguna untuk melihat kesesuaian informasi yang peneliti dapatkan. Karakteristik informan triangulasi dalam penelitian ini yaitu pengurus Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi, Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Bukittinggi sebagai pendamping dan pengawas aktivitas Kopinkra Pusako Minang, dan dinas-dinas provinsi terkait dalam pembinaan koperasi. Dalam pemilihan triangulasi, peneliti tidak menetapkan jumlah pasti informan triangulasi, namun akan ditetapkan sesuai kebutuhan penelitian hingga data yang peneliti butuhkan sudah menjawab kebenaran dari semua pertanyaan penelitian. Berikut informan triangulasi dalam penelitian ini :

Tabel 3.4
Tabel Informan Triangulasi

Nama	Alasan Pemilihan Informan
M. Idris	Karena merupakan kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi
Hj. Novita	Karena merupakan ketua Kopinkra Pusako Minang dan perwakilan koperasi untuk pembinaan koperasi OVOP di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
Desi Arisandi	Karena merupakan salah satu anggota koperasi yang merupakan pengrajin bordiran dan sulaman serta sering mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
Hj Ismawati	Karena merupakan bendahara Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi
Herlina	Karena merupakan pengelola unit bahan baku pada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi
Yet	Karena merupakan salah satu anggota Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

4.1.1 Profil

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat adalah bagian kantor pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Sumatera Barat. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berada di Jalan Khatib Sulaiman No.11, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki visi yaitu “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, berdaya saing tinggi, berorientasi pasar dan berbasis sumber daya lokal”. Sedangkan misi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi

2. Meningkatkan kapasitas koperasi untuk mengelola potensi ekonomi serta usaha simpan pinjam
3. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM.⁵¹

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 57 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah lingkup provinsi dan kabupaten / kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

⁵¹ Renja tahun 2017 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program, dan keuangan.

Sedangkan fungsi dari sekretariat pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat adalah

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas
2. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kepegawaian.

2. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan evaluasi di bidang kelembagaan
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan, dan data koperasi.

3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.

Fungsi dari Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan adalah:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan.

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi.

4. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, pengembangan, penguatan, dan perlindungan koperasi.

Fungsi dari Bidang Pemberdayaan Koperasi adalah

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas SDM koperasi
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan, dan perlindungan koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, dan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Fungsi dari Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil adalah

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha kecil
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan.

6. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi

UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan dan latihan koperasi.

Fungsi dari UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi adalah

1. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi
2. Pengkajian analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi

3. Pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi di lapangan
4. Pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi
5. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang pendidikan dan latihan koperasi
6. Pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.⁵²

4.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, yang membawahi:

- a. Sub. Bagian Tata Usaha
- b. Sub. Bagian Keuangan
- c. Sub. Bagian Program

⁵² Laporan Kinerja tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawahi:

- a. Seksi Perizinan
- b. Seksi Kelembagaan
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, yang membawahi:

- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
- b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, yang membawahi:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
- b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- c. Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawahi:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Kecil
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

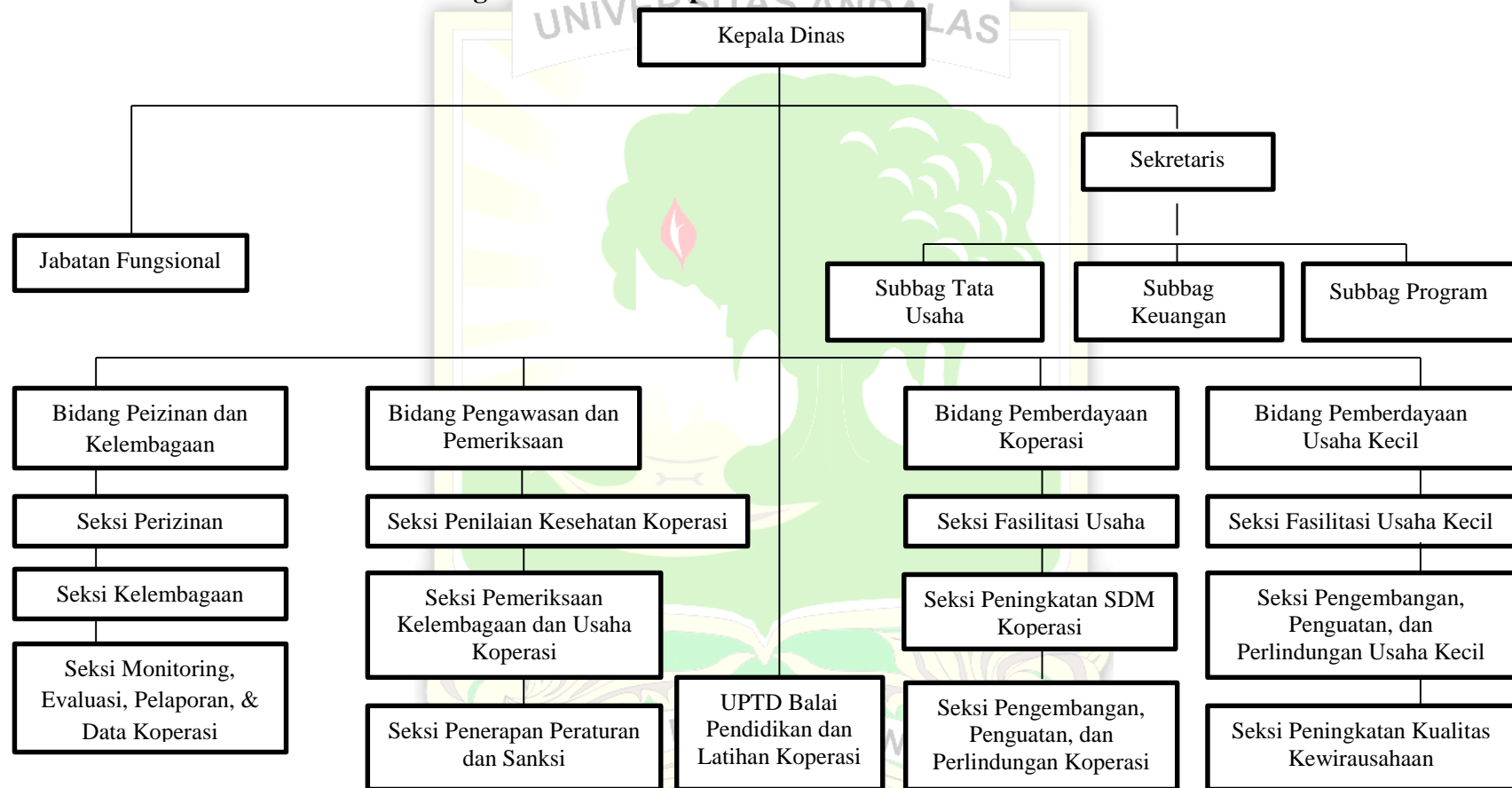
Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor : 061/8953/SJ perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 98 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Desember 2017, maka struktur UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi (BALATKOP) Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Kasubag Tata Usaha
- c. Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan
- d. Kasi Penyelenggaraan Diklat



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat



4.2 Profil Koperasi Industri dan Kerajinan (KOPINKRA) Pusako Minang Kota Bukittinggi

Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi merupakan sebuah koperasi yang bergerak pada bidang produksi bordiran dan kerancang. Kopinkra Pusako Minang dibentuk pada tanggal 14 April 2011 yang diprakarsai oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) se-Kota Bukittinggi karena bordiran dan kerancang merupakan kerajinan tangan (*Handmade*) anak nagari Kota Bukittinggi. Pembentukan awal Kopinkra Pusako Minang diawali dengan rapat yang dihadiri oleh 68 orang dan membentuk Kopinkra Pusako Minang yang awalnya beralamat di Kantor Dekranasda, Jl. DR. A. Rivai No. 17 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi dan kemudian dipindahkan ke Jl. Soekarno Hatta Banto Trade Center Kecamatan Aur Tajungkang Tengah Sawah.

Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi pada tahun 2012 telah memiliki badan hukum dengan nomor 42/BH/III.10/X-2012. Hingga saat ini Kopinkra Pusako Minang telah memiliki anggota sebanyak 78 orang yang berasal dari Kota Bukittinggi dan luar Kota Bukittinggi. Kopinkra Pusako Minang telah memiliki unit usaha simpan pinjam dan unit baku sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota koperasi. Pada tahun 2017, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2017 ditetapkan struktur organisasi Kopinkra Pusako Minang sebagai berikut :

1. Pengurus

Ketua : Hj. Novita

Sekretaris : Desi Arisandi

Bendahara : Hj. Ismawati

2. Badan Pemeriksa (Pengawas)

Ketua : Desi Oktavia

Anggota : Trimuliati

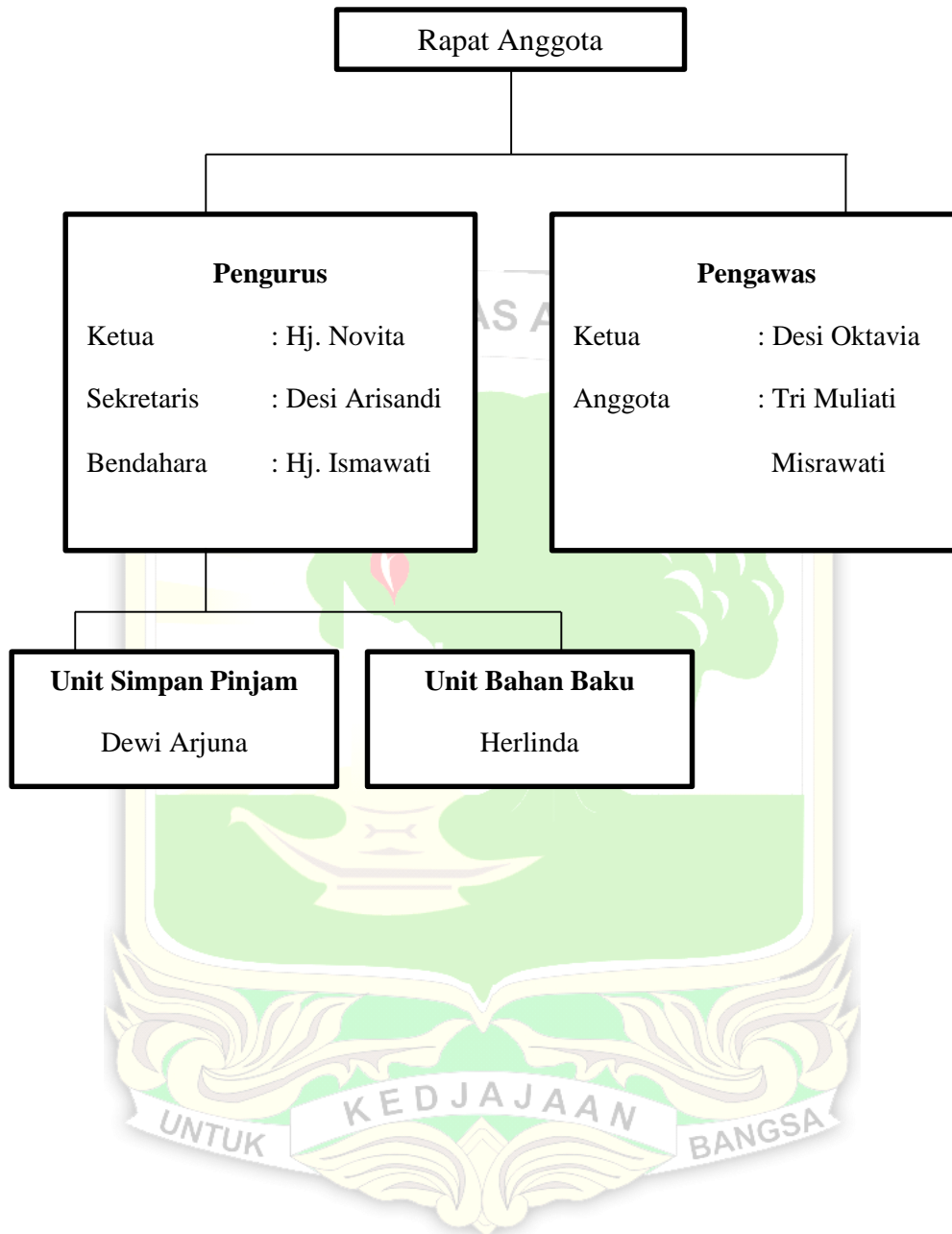
Misrawati

3. Pengelola : Dewi Arjuna

4. Karyawan : Herlinda



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi



BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan pengembangan produk unggulan daerah. Pemerintah membentuk program-program pemberdayaan koperasi yang bergerak pada bidang produk unggulan daerah agar mampu mengembangkan produk yang telah dihasilkan. Berbagai kegiatan pendukung program pemberdayaan terhadap koperasi telah dilakukan namun seperti yang telah peneliti sampaikan pada bab I masih banyak koperasi yang masih belum mampu mengembangkan produknya sehingga sulit untuk bersaing sebagai akibat dari masih rendahnya partisipasi anggota koperasi. Kemudian, masih kurangnya inovasi yang dilakukan koperasi terhadap produknya menyebabkan produk koperasi tidak mampu bersaing baik di pasar nasional maupun pasar global.

Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab I bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi yang melakukan berbagai program pemberdayaan koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat salah satunya yaitu Koperasi Industri dan Kerajinan Pusako Minang Kota Bukittinggi yang merupakan koperasi pengembangan produk sulaman dan bordiran yang berada di Kota Bukittinggi dan merupakan koperasi peraih peringkat 1 pada Uji Petik Pengawasan Perkoperasian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melihat bagaimana pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi berikut peneliti sampaikan hasil penelitian, yang mana hasil temuan peneliti dianalisis menggunakan teori pemberdayaan Cho yang menggunakan 2 variabel utama dalam menganalisis pemberdayaan yakni *Structural Empowerment* (Pemberdayaan Struktural) dan *Psychological Empowerment* (Pemberdayaan Psikologis). Secara umum dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan dua program yaitu program peningkatan kelembagaan koperasi dan program peningkatan daya saing koperasi. Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi pun menerima program peningkatan daya saing koperasi berupa pemberdayaan terhadap koperasi produk unggulan daerah.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Edwar yang merupakan Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang ada di Sumatera Barat sendiri, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memegang kendali dalam mengkoordinasikan seluruh Dinas Koperasi yang ada di seluruh Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam program pemberdayaan yang dirumuskan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Semua bentuk pemberdayaan tersebut telah ada dalam Perda nomor 16 tahun 2019..” (wawancara dengan Bapak Edwar pada 10 Juni 2021 pukul 11.45 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan koperasi di Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memegang kendali atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan setiap program serta kegiatan dilandaskan kepada Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, aspek-aspek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Manajemen

Pemberdayaan koperasi pada aspek manajemen dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Bimbingan teknis
- c. Pendampingan

2. Pendidikan dan pelatihan

Pemberdayaan koperasi pada aspek pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- b. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
- c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis
- d. Pendidikan dan pelatihan manajerial

- e. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- f. Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping, dan fasilitator
(*training of trainers*)

3. Teknologi dan informasi

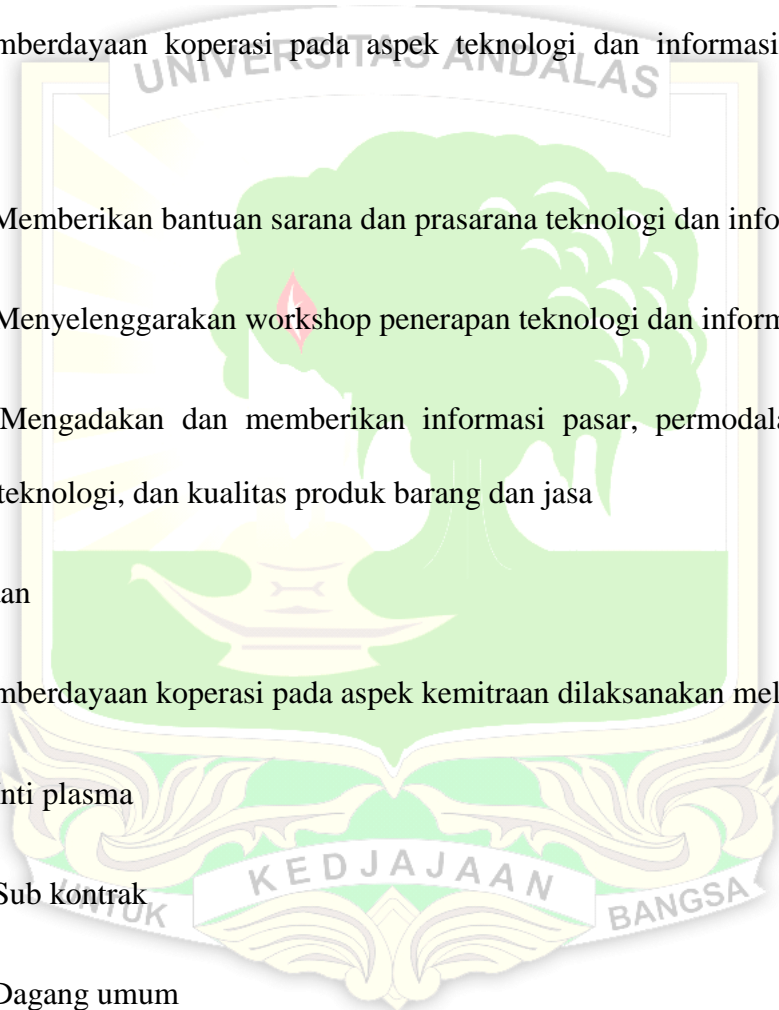
Pemberdayaan koperasi pada aspek teknologi dan informasi dilakukan melalui :

- a. Memberikan bantuan sarana dan prasarana teknologi dan informasi
- b. Menyelenggarakan workshop penerapan teknologi dan informasi
- c. Mengadakan dan memberikan informasi pasar, permodalan, desain, teknologi, dan kualitas produk barang dan jasa

4. Kemitraan

Pemberdayaan koperasi pada aspek kemitraan dilaksanakan melalui pola :

- a. Inti plasma
- b. Sub kontrak
- c. Dagang umum
- d. Waralaba
- e. Keagenan



5. Bahan baku

Pemberdayaan koperasi pada aspek bahan baku dilakukan dengan cara :

- a. Pemberian kemudahan pengadaan bahan baku bagi pengolahan produk koperasi
- b. Pemanfaatan potensi sumber daya daerah
- c. Pengembangan kerjasama antar daerah
- d. Pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan

6. Produksi dan pengolahan

Pemberdayaan koperasi pada aspek produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara :

- a. Pelatihan, bimbingan teknis, magang, pendampingan dan kerjasama dengan pihak lainnya dalam hal teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen produksi
- b. Pemberian kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi, dan pengolahan
- c. Dorongan terhadap penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan

7. Permodalan

Pemberdayaan koperasi pada aspek permodalan dilakukan melalui :

- a. Pemberian modal penyertaan kepada bank milik Daerah untuk memberikan pinjaman kepada koperasi dengan skim kredit khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan kepada koperasi untuk mendapatkan permodalan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank serta dunia usaha
- c. Pemberian bantuan hibah kepada koperasi melalui APBD
- d. Pemberian bantuan akses pemanfaatan dana bergulir melalui Badan Layanan Umum Daerah
- e. Penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan yang dialokasikan bagi koperasi dalam bentuk pinjaman, penjaminan, dan bentuk pembiayaan lainnya
- f. Pemberian jaminan oleh lembaga penjaminan Daerah terhadap pinjaman koperasi kepada lembaga keuangan

8. Pemasaran

Pemberdayaan koperasi pada aspek pemasaran dilakukan melalui :

- a. Penelitian dan pengkajian pemasaran
- b. Penyebarluasan informasi pasar
- c. Peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran

- d. Penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, sarana penjualan produk, dan promosi koperasi
- e. Pemberian dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, distribusi produk
- f. Penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran⁵³

Dengan adanya peraturan daerah tersebut bisa dijadikan landasan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam memberdayakan koperasi. Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pemberdayaan koperasi. Kemudian untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dari setiap aspek-aspek pemberdayaan koperasi sesuai dengan perda tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi, adapun kutipan wawancaranya yaitu :

⁵³ Perda Sumbar nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pasal 7 – pasal 14

“...Untuk aspek dalam perda pemberdayaan koperasi itu aspeknya secara umum untuk koperasi. Kopinkra sendiri adalah koperasi produk unggulan. Jadi untuk aspek pemberdayaan koperasi yang kami lakukan disesuaikan dengan permasalahan yang ditemui pada koperasi-koperasi produk unggulan yang kami bahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi kabupaten / kota di Sumbar. Untuk koperasi produk unggulan, beberapa aspek yang kami lakukan yaitu manajemen, pendidikan dan pelatihan, kemitraan, dan pemasaran...”
(wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M.Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat untuk koperasi yang bergerak pada produk unggulan tidak semua aspek pemberdayaan dilaksanakan. Karena aspek yang terdapat pada Perda nomor 16 tahun 2019 merupakan aspek pemberdayaan koperasi secara umum menurut segala jenis koperasi di Sumatera Barat. Untuk Kopinkra Pusako Minang sendiri yang merupakan koperasi produk unggulan hanya memperoleh beberapa aspek pemberdayaan koperasi antara lain aspek manajemen, pendidikan dan latihan, kemitraan, dan pemasaran. Untuk melihat apa saja bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan aspek-aspek tersebut terutama terhadap pemberdayaan koperasi yang bergerak pada produk unggulan daerah, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Kegiatan pemberdayaan koperasi untuk koperasi produk unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dilakukan hanya beberapa aspek. Pertama aspek manajemen berupa pendampingan terhadap koperasi berupa kunjungan kepada koperasi. Untuk pendidikan dan pelatihan ada beberapa kegiatan misalnya pendidikan perkoperasian, kewirausahaan. Kemudian untuk aspek kemitraan, Dinas Koperasi dan UKM akan menjembatani koperasi untuk bermitra dengan BUMN. Untuk aspek produksi dan pengolahan kami melakukan pelatihan pengembangan kreasi produk dan motivasi untuk koperasi. Dan terakhir untuk aspek pemasaran, kami melakukan bimbingan dalam hal teknik pemasaran produk, menyediakan sarana bagi koperasi yang ingin mempromosikan produknya yaitu aplikasi Bajajo.id...” (Wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M.Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan aspek pemberdayaan koperasi produk unggulan sesuai Perda nomor 16 tahun 2019 dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

5.1. Aspek Manajemen

Pada aspek manajemen, dalam memberdayakan koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola koperasinya. Terdapat beberapa kegiatan untuk pemberdayaan koperasi pada aspek manajemen antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Untuk mengetahui lebih rinci kegiatan pemberdayaan koperasi pada aspek manajemen, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Sejauh ini untuk aspek manajemen dalam pemberdayaan koperasi di Sumbar kami hanya menekankan kepada pendampingan terhadap koperasi karena untuk bimbingan teknis dan kegiatan pelatihan itu nantinya lebih rinci pada aspek pelatihan sendiri. Untuk pendampingan Kopinkra Pusako Minang sendiri kami berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi,..” (wawancara dengan Ir Zirma Yusri pada 13 September 2021 pukul 13.20 WIB via telepon)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan koperasi pada aspek manajemen, pemberdayaan lebih ditekankan kepada pendampingan terhadap koperasi yang berupa kunjungan terhadap koperasi terkait dalam jangka waktu tertentu. Untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, lebih rinci kegiatan dilakukan dengan aspek sendiri.

Adapun analisis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama terhadap Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi menggunakan variabel pada teori Cho yaitu :

5.1.1 Structural Empowerment (Pemberdayaan Struktural)

Structural Empowerment atau Pemberdayaan Struktural merupakan pemberdayaan dengan pemberian akses kepada bawahan terhadap struktur pada organisasi yang memungkinkan bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang bermakna.⁵⁴ Pemberdayaan struktural berdasarkan teori Cho terdapat beberapa indikator yang akan peneliti analisis berkaitan dengan pelaksanaan

⁵⁴ Nuvitasari, Afivatul. 2019. *Pengaruh Pemberdayaan Struktural terhadap Perilaku Berorientasi Pelanggan dengan Pemberdayaan Psikologis sebagai Mediator*. Jurnal Fenomena vol. 28 no 1 hal 1-9

kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun analisis rincian indikator Pemberdayaan Struktural tersebut yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemberdayaan organisasi dapat diartikan sebagai suatu proses manajemen yang menunjukkan adanya pengalokasian kekuasaan dan wewenang kepada anggota organisasi melalui partisipasi di mana keputusan yang diambil dalam organisasi diterima oleh seluruh anggota organisasi sebagai pelaksanaan keputusan tersebut. Pada indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam aspek manajemen peneliti menekankan kepada keterlibatan pihak-pihak dalam pelaksanaan pendampingan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Untuk mengetahui secara rinci partisipasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Pemberdayaan koperasi merupakan salah satu visi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sehingga seluruh koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat akan memperoleh setiap bentuk kegiatan pemberdayaan. Dalam memberdayakan koperasi produk unggulan itu kami melibatkan beberapa pihak dalam bentuk kerjasama dengan pihak tersebut. Bidang Pemberdayaan Koperasi yang memegang pelaksanaan program pemberdayaan koperasi melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Bukittinggi untuk memilih koperasi yang akan diikuti dalam kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan. Pengambilan keputusan pemberdayaan kami melibatkan dinas koperasi kabupaten / kota dan tidak melibatkan koperasi. Selanjutnya kegiatan pendampingan pun, kami serahkan kepada

Bidang Pemberdayaan Koperasi...” (Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Zirna Yusri pada 1 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Zirna Yusri tersebut dapat dilihat bahwa secara garis besar semua pihak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mulai dari Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai bidang yang melaksanakan setiap kegiatan yang mendukung program pemberdayaan koperasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi produk unggulan, Bidang Pemberdayaan Koperasi tidak melibatkan bidang lain pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan juga tidak melibatkan koperasi dalam pengambilan keputusan. Koperasi hanya terlibat sebagai kelompok sasaran. Karena sepenuhnya wewenang dalam memberdayakan koperasi adalah wewenang Bidang Pemberdayaan Koperasi termasuk dalam hal pendampingan koperasi. Untuk mengetahui penglibatan bidang lain dan bagaimana penglibatan bidang lain dalam pendampingan koperasi, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi, adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk penglibatan bidang lain di dinas koperasi kami tidak melibatkan bidang lain ketika adanya pelaksanaan kegiatan pembinaan karena setiap bidang punya wewenang dan tugas tersendiri. Kemudian dalam pengambilan keputusan perumusan khusus untuk program pemberdayaan koperasi juga tidak ada penglibatan bidang lain dan penglibatan koperasi. Kami hanya mengundang dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten / kota untuk memberikan masukan terkait permasalahan koperasi di kabupaten / kota. Termasuk nantinya ketika kunjungan pendampingan untuk koperasi, kami akan berkoordinasi dengan

dinas koperasi kabupaten / kota. Untuk pendampingan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sendiri kami akan berkoordinasi dengan Diskoperindag Kota Bukittinggi dan ketika ada kunjungan koperasi mereka akan mendampingi kami juga...” (wawancara dengan ibu Ira Heti, ST. M.Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan pendampingan dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan berupa kunjungan ke koperasi dalam jangka waktu tertentu. Penglibatan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi ketika adanya pendampingan yaitu hanya menyiapkan hal-hal yang nantinya diperlukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika melakukan kunjungan. Kunjungan tersebut dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi terkait perizinan kunjungan.

Kemudian untuk mengetahui penglibatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pendampingan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Diskoperindag Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Setiap tahun kami selalu diundang untuk hadir dalam perumusan keputusan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Tujuannya adalah agar setiap dinas koperasi Kabupaten / Kota memiliki satu pemikiran dalam pemberdayaan dan mengetahui apa saja program pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Sehingga kami juga bisa menentukan program kami sendiri. Ketika nantinya ada kegiatan yang akan dilaksanakan, kami akan menunggu koordinasi dari dinas koperasi provinsi dan kami memilih koperasi yang akan mengikuti kegiatan serta akan kami

dampingi. Kami juga berkoordinasi nantinya dengan dinas koperasi provinsi apabila ada kunjungan ke koperasi...” (hasil wawancara dengan Bapak M. Idris pada 13 Oktober 2020 pukul 11.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya penglibatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam pengambilan keputusan untuk penetapan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat. Keterlibatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat setiap tahunnya. Ketika adanya pelaksanaan program, koordinasi akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat kepada Diskoperindag Kota Bukittinggi yang kemudian memilih koperasi yang akan didampingi untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kemudian untuk mengetahui hal lain, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Novita selaku ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Tidak ada penglibatan koperasi ketika rapat pengambilan keputusan di Padang. Kami hanya berpartisipasi ketika adanya kunjungan dari provinsi. Nantinya kami akan menyiapkan hal-hal yang ingin dilihat oleh perwakilan dari dinas provinsi...” (hasil wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 17 Oktober 2020 pukul 14.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada penglibatan koperasi dalam pengambilan keputusan. Kopinkra Pusako Minang akan menyiapkan segala

keperluan yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika berkunjung ke koperasi.

Selain itu, dalam hal partisipasi pada pelaksanaan aspek manajemen pemberdayaan koperasi peneliti juga melihat sejauh mana akses koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama dalam mencari solusi untuk permasalahan yang ditemukan koperasi dan pemberian saran yang diperlukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat serta ada tidaknya pelaksanaan *public hearing* bagi koperasi. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk pemberian saran bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi itu kami terbuka terhadap setiap saran dari koperasi karena saran dari koperasi sangat kami perlukan untuk pengembangan program pemberdayaan koperasi. Kami memberikan kebebasan bagi koperasi yang ingin meminta solusi atau memberi saran langsung kepada kami kapan saja. Ketika kunjungan ke koperasi disana kami juga akan merangkum permasalahan yang ditemui koperasi...” (wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M,Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koperasi memiliki akses yang mudah kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam menyampaikan saran dan permasalahan yang ditemui koperasi. Koperasi diberikan kebebasan untuk menyampaikan hal tersebut setiap waktu baik melalui telepon maupun ketika adanya kunjungan ke koperasi yang kemudian masukan tersebut dihimpun langsung ketika kunjungan. Selain penyampaian

secara langsung oleh koperasi, penyampaian saran dan permasalahan juga dilakukan ketika adanya rapat koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi pada Kabupaten / Kota.

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Koperasi memang bebas mau menghubungi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kapanpun. Ketika pembinaan juga terkadang di akhir acara juga diadakan sesi mendengar saran dan permasalahan. Termasuk nantinya ketika ada kunjungan dari provinsi disana kami juga diperbolehkan memberikan masukan dan menyampaikan permasalahan...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 10.55 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akses bagi koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mudah dilakukan. Koperasi memiliki kebebasan akses dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan *public hearing* dalam kegiatan pembinaan walaupun tidak dilaksanakan dalam setiap kegiatan. Selain itu, dalam pelaksanaan pendampingan berupa kunjungan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, koperasi memiliki kebebasan dalam menyampaikan masukan dan permasalahan kepada perwakilan yang berkunjung.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dalam hal partisipasi pada aspek manajemen yang berupa pendampingan koperasi dapat diketahui bahwa dalam perumusan keputusan belum adanya penglibatan koperasi yang merupakan kelompok sasaran. Koperasi hanya terlibat dalam menyiapkan keperluan yang dibutuhkan ketika adanya kunjungan dari Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Sumatera Barat. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

2. Umpan Balik Kinerja

Umpan balik kinerja dalam pemberdayaan organisasi dapat diartikan sebagai suatu praktik manajemen yang bertujuan untuk mengontrol tindakan organisasi di masa depan. Pada pelaksanaan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yakni aspek manajemen berupa kegiatan pendampingan, umpan balik kinerja berkaitan dengan kinerja yang diberikan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi ketika adanya kunjungan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui bagaimana umpan balik kinerja tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Kopinkra Pusako Minang selalu menerima kunjungan kami dengan baik. Apapun yang kami butuhkan ketika kunjungan terutama berkaitan dengan pembinaan yang mereka terima sebelumnya, mereka pasti menyiapkan hal tersebut dengan baik. Selain itu, sejauh ini Kopinkra pusako minang tidak pernah menemukan permasalahan dalam koperasi mereka. Mereka mampu menyelesaikan permasalahan sendiri...” (wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M, Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.56 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ira Heti di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang mampu memberikan umpan balik kinerja yang baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari mampunya Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi memberikan semua hal yang diperlukan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika melakukan kunjungan. Selain itu, Kopinkra Pusako Minang juga tidak pernah menemukan permasalahan yang berarti ketika melakukan aktivitas koperasi.

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Ketika adanya berita kunjungan dari provinsi kami akan selalu menyiapkan keperluan yang nantinya akan dilihat oleh perwakilan yang berkunjung. Selain itu, ketika kunjungan tersebut kami juga memberikan buku tamu untuk diisi oleh perwakilan provinsi. Kami juga terkadang memberikan masukan dan bertukar fikiran dengan perwakilan provinsi terkait koperasi kami...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita 13 Agustus 2021 pukul 11.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi selalu mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan bagi kunjungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi juga menyediakan buku tamu untuk diisi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan juga menyampaikan masukan serta bertukar fikiran terkait kinerja koperasi.

Gambar 5.1
Bukti Kunjungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

BUKU TAMU						
No. Urut	Tanggal	NAMA TAMU	Instansi / Alamat	Bertemu dengan	Keperluan tamu	Tanda Tangan Tamu
2	3	4	5	6	7	
51)	4-5 Juli 2019	1. SYAFRIZAL 2. Zaidil Bahari	Dinas UKM Provinsi Sum. Barat	Pangkas dan Sekretaris	Penelitian dan Pembinaan Koperasi Koperasi Pusako Minang.	[Signature]
	21 Juli 2017	JUSWADI, SRI WINDAYANI ASWADI	DINAS KOP. UKM PROV. SUMBAR	Pangkas	DALAM RANGKA PERIKEN- TASIAN KOP. BERKAITAN RIL- BERSEKALA BESAR. Menuju skala besar. revitalisasi usaha koperasi	[Signature]
	15. Juni 2017	Ir. Zuhendi, M.P. Yeni Susanto, ST, MSi Aswadi SE	Dinas Koperasi UKM PROV. SUMBAR	Pangkas		[Signature]

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang telah mampu memberikan umpan balik yang baik terkait dengan pelaksanaan aspek manajemen berupa pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari mampunya Kopinkra Pusako Minang menyediakan seluruh keperluan yang dibutuhkan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika melakukan kunjungan dan tersedianya buku tamu yang akan diisi oleh perwakilan yang berkunjung tersebut. Selain itu, Kopinkra Pusako Minang juga memberikan umpan balik berupa masukan dan mampu bertukar fikiran dengan perwakilan yang melakukan kunjungan.

3. Delegasi

Delegasi merupakan suatu proses pemberian wewenang kepada anggota organisasi sehingga memungkinkan bagi anggota organisasi untuk bekerja sesuai hierarki organisasi dalam pembuatan keputusan. Delegasi juga merupakan suatu tipe yang hampir memiliki persamaan dengan *Participative Decision Making* (PDM) karena adanya penglibatan langsung anggota organisasi dalam pengambilan keputusan melalui pemberian wewenang dan pelaksanaannya. Sehingga, ketika adanya pendelegasian wewenang kepada anggota organisasi, anggota organisasi yang menerima wewenang tersebut harus melaksanakannya. Dalam aspek delegasi pada pelaksanaan aspek manajemen pemberdayaan koperasi terutama Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, delegasi wewenang dilakukan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi pada dinas tersebut untuk melakukan pendampingan dan kegiatan kunjungan terhadap koperasi. Untuk melihat delegasi wewenang tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Pemberdayaan koperasi di Sumatera Barat merupakan wewenang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kepala dinas pun menyerahkan wewenang kepada kami sebagai Bidang Pemberdayaan Koperasi untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemberdayaan koperasi. Untuk pendampingan berupa kunjungan koperasi itu kami akan koordinasikan dahulu kepada kepala dinas koperasi dan ukm sumbar, nantinya kepala dinas akan mengeluarkan surat tugas dan mengkoordinasikan dengan dinas koperasi kabupaten / kota...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E, M.M pada 5 September 2021 pukul 15.00 WIB via whatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa delegasi wewenang untuk pemberdayaan koperasi terutama dalam pendampingan dan kunjungan koperasi, diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi sehingga setiap kegiatan pemberdayaan koperasi dipegang penuh oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi. Ketika adanya kunjungan koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi akan mengkoordinasikan dengan kepala dinas dalam mengeluarkan surat tugas dan menjembatani koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Untuk mengetahui pelaksanaan delegasi wewenang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk perizinan kunjungan ke koperasi itu kami tidak terlalu tahu, namun setiap kunjungan dari provinsi, perwakilan salah satunya berasal dari pihak yang mengurus pemberdayaan koperasi dan juga kunjungan itu selalu didampingi Diskoperindag Kota Bukittinggi...” (wawancara dengan Ibu Hj Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.20 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kunjungan selalu dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi yang memegang penuh pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan kunjungan tersebut selalu di didampingi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Sehingga, berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendelegasian wewenang

dalam pelaksanaan pendampingan berupa kunjungan koperasi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jelasnya penyerahan wewenang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Dengan demikian, jika dilihat dari indikator pemberdayaan struktural menurut teori Cho, pemberdayaan struktural telah berjalan dengan baik karena telah terlaksananya seluruh indikator pemberdayaan struktural tersebut walaupun terdapat sedikit permasalahan yaitu dalam hal penglibatan koperasi dalam pengambilan keputusan.

5.1.2 *Psychological Empowerment* (Pemberdayaan Psikologis)

Psychological Empowerment atau Pemberdayaan Psikologis adalah pemberdayaan terhadap individu atau kelompok yang mana setiap individu atau kelompok memiliki kemungkinan untuk mengembangkan dirinya melalui intervensi manajemen, pelatihan, dan pemberian motivasi.⁵⁵ Menurut cho, pada dasarnya pemberdayaan psikologis berorientasi kepada nilai kognitif individu atau kelompok pada level terendah.⁵⁶

1. Makna

Makna dalam pemberdayaan didefinisikan sebagai kesesuaian antara sistem nilai individu atau kelompok dengan aktivitas dalam pekerjaan yang

⁵⁵ Cho, Taejun dan Faerman. Ibid

⁵⁶ Cho, Taejun dan Faerman. Op Cit. Hlm 37

berpengaruh terhadap kinerja individu atau kelompok tersebut. Makna dalam pemberdayaan akan menimbulkan sebuah komitmen dan keterlibatan karena dengan adanya kesesuaian sistem nilai dengan aktivitas dalam pekerjaan akan membuat individu atau kelompok berpikir bahwa pekerjaan tersebut penting bagi mereka dan mereka akan berusaha untuk peduli terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam aspek makna, peneliti melihat bagaimana kesesuaian wewenang dalam penyampaian adanya pelaksanaan kunjungan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ke Kopinka Pusako Minang Kota Bukittinggi.

Untuk melihat kesesuaian wewenang yang dilakukan dalam pendampingan koperasi dan kunjungan ke Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Bidang pemberdayaan koperasi selalu melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan apa yang diberikan. Dalam kunjungan koperasi, mereka selalu mengkoordinasikan dengan saya selaku kepala dinas. Nantinya saya akan mengeluarkan surat tugas dan Bidang Pemberdayaan Koperasi sendiri akan menghubungi secara langsung Kopinkra Pusako Minang terkait adanya kunjungan...” (wawancara dengan Bapak Ir. Zirna Yusri pada 13 September 2021 pukul 13.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan aspek manajemen dalam pemberdayaan koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi selalu menyampaikan setiap kegiatan kepada Kepala

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan juga menghubungi langsung Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi untuk memberitahukan adanya kunjungan tersebut. Kemudian Kopinkra Pusako Minang nantinya akan menyiapkan keperluan dalam kunjungan.

Kemudian, untuk mengetahui kebenaran penyampaian yang dilakukan Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam menyampaikan adanya kegiatan kunjungan ke koperasi, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Setiap ada kunjungan dari provinsi, kami memang selalu menerima informasi melalui media telepon. Dan ketika berkunjung tersebut perwakilan dinas koperasi provinsi selalu membawa surat tugas yang kemudian kami masukkan ke buku tamu. Setiap adanya informasi kunjungan, kami akan mencatat jadwal kunjungan dari dinas koperasi provinsi...” (Wawancara dengan Ibu Hj.Novita3 pada 18 Agustus 2021 pukul 11.23 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan informasi melalui media telepon kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi terkait adanya kunjungan yang mana informasi jadwal kunjungan tersebut akan dicatat oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Selain itu, dalam setiap kunjungan perwakilan Bidang Pemberdayaan Koperasi akan selalu membawa surat tugasnya.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan aspek makna berupa penyampaian informasi terkait pelaksanaan pendampingan dan kunjungan ke koperasi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut

dapat dilihat dari adanya kesesuaian wewenang yang dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung dari Bidang Pemberdayaan Koperasi kepada Kopinkra Pusako Minang sebagai kelompok sasaran.

2. Kompetensi

Kompetensi dalam pemberdayaan berkaitan dengan sejauh mana anggota organisasi mengetahui dan memahami pekerjaan dan wewenang yang dilakukan karena setiap individu atau kelompok akan mampu melakukan tugas yang baik dengan kemampuan dan keterampilan. Sehingga dengan adanya kompetensi, akan mampu mengurangi stres dan ketegangan dalam melakukan pekerjaan dan wewenang yang dilakukan.

Kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dilihat dari kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan aspek manajemen pemberdayaan koperasi berupa kunjungan ke koperasi. Untuk mengetahui kapasitas yang dimiliki Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun hasil wawancaranya yaitu :

“...Untuk kapasitas bidang pemberdayaan koperasi sendiri bisa dibilang telah memiliki kapasitas yang baik karena seluruh pegawai di Bidang Pemberdayaan Koperasi telah memperoleh pendidikan tinggi. Lalu untuk kunjungan koperasi, kami akan selalu mengirimkan perwakilan dari bidang kami yang juga memiliki kompetensi yang baik sehingga nantinya bisa membantu permasalahan koperasi secara langsung ketika kunjungan...”
(wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E. M.M pada 5 September 2021 pukul 15.10 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kapasitas yang dimiliki oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan koperasi telah baik karena seluruh pegawai pada Bidang Pemberdayaan Koperasi telah memperoleh pendidikan tinggi. Selain itu, ketika kunjungan ke koperasi, perwakilan dari Bidang Pemberdayaan Koperasi juga mampu membantu permasalahan koperasi dengan baik.

Untuk mengetahui kapasitas Bidang Pemberdayaan Koperasi ketika melaksanakan kunjungan koperasi terutama ke Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Menurut saya, memang benar pegawai dinas koperasi provinsi yang selalu melakukan kunjungan ke koperasi memiliki kompetensi baik walaupun setiap kunjungan perwakilan yang datang berbeda-beda. Apapun yang kami tanyakan, mereka selalu mampu menjawab dengan baik sehingga kami tidak kesulitan dalam pengertian apa yang mereka sampaikan...” (wawancara dengan Ibu Hj Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.26 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Novita tersebut dapat diketahui bahwa Bidang Pemberdayaan Koperasi memiliki kapasitas yang baik terutama pegawai yang melakukan kunjungan ke Kopinkra Pusako Minang karena

ketika melakukan kunjungan, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mampu menjawab setiap permasalahan yang ditanyakan Kopinkra Pusako Minang dengan baik dan mudah dimengerti.

Dari analisis hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi telah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh pegawai Bidang Pemberdayaan Koperasi dan kemampuan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang melakukan kunjungan koperasi yang mampu menjawab permasalahan koperasi dengan baik.

3. Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri dalam pemberdayaan berkaitan dengan keyakinan dalam diri individu bahwa ia memiliki kebebasan dalam mempengaruhi perilakunya ketika bekerja. Penentuan nasib sendiri juga berkaitan kemandirian individu dalam proses manajemen. Kebebasan tersebut mampu meningkatkan kepuasan dan efektifitas kerja.⁵⁷ Penentuan nasib sendiri dalam pemberdayaan dilakukan dengan pemberian motivasi sehingga mampu meningkatkan inovasi dan kreasi dari kelompok sasaran pemberdayaan. Pemberdayaan nasib sendiri pada aspek manajemen pemberdayaan koperasi dilihat dari pemberian motivasi yang dilakukan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika melaksanakan kunjungan koperasi. Untuk melihat hal tersebut, peneliti

⁵⁷ Cho, Taejun dan Faerman. Op Cit. hal 38

melakukan wawancara dengan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.

Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Ketika saya melakukan kunjungan ke koperasi, disamping motivasi ketika kegiatan di Padang, saya akan selalu mencoba memberikan sedikit motivasi kepada anggota koperasi yang berada di koperasi saat kunjungan agar semangat anggota koperasi semakin meningkat. Selain itu, pemberian motivasi tersebut memang dipesankan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi karena sangat berkaitan untuk pengembangan kualitas SDM koperasi...” (wawancara dengan Ir. Zulhendi pada 5 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui, pemberian motivasi untuk koperasi selalu dilakukan oleh perwakilan yang melakukan kunjungan koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kinerja bagi anggota koperasi. Kemudian, untuk menguji pelaksanaan pemberian motivasi ketika kunjungan koperasi, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Ketika kunjungan ke koperasi, selain melihat-lihat koperasi dan bertukar pikiran, perwakilan dinas koperasi provinsi juga memberi kami beberapa motivasi. Dan itu sangat berguna bagi kami terutama dalam meningkatkan kinerja koperasi kami. Semangat kami juga naik karena motivasi yang diberikan memberikan kami ilmu baru...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap kunjungan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan motivasi untuk anggota Kopinkra Pusako Minang. Adanya motivasi

tersebut sangat berguna bagi anggota kopinkra karena memberikan mereka ilmu baru dan semangat dalam melakukan aktivitas koperasi.

Dari analisis wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan aspek penentuan nasib sendiri berupa pemberian motivasi ketika kunjungan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pemberian motivasi ketika pelaksanaan kunjungan koperasi dan pemberian motivasi tersebut mampu meningkatkan semangat anggota koperasi.

4. Dampak

Dampak dalam pemberdayaan berkaitan dengan keyakinan dalam individu atau kelompok bahwa mereka memiliki kendali lebih dari hasil yang akan mampu mempengaruhi organisasi. Dampak dalam pemberdayaan juga berkaitan dengan kontrol atas seluruh pekerjaan dan hasilnya yang nantinya akan berpengaruh kepada kepuasan kerja dan efektifitas kerja.⁵⁸ Dampak yang diperoleh oleh sebuah organisasi tidak hanya berupa dampak positif tetapi juga berupa dampak negatif sehingga lebih lanjut dampak mengacu kepada perubahan yang terjadi dalam situasi sebagai akibat dari sebuah program pemberdayaan.

Dampak pada pelaksanaan aspek manajemen berupa kunjungan koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dilihat dari nilai yang diterima dari pelaksanaan kunjungan tersebut. Untuk melihat dampak yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti

⁵⁸ Cho, Taejun dan Faerman. Ibid

melakukan wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Adanya kunjungan koperasi sangat memberikan dampak yang baik bagi kami. Kami jadi tahu apapun permasalahan koperasi dan bisa melihat permasalahan itu secara langsung. Sehingga, nantinya permasalahan tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti SE, MM pada 5 September 2021 pukul 15.15 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya kunjungan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memberikan dampak positif terutama bagi Bidang Pemberdayaan Koperasi. Dengan adanya kunjungan koperasi, permasalahan koperasi bisa diketahui secara langsung dan permasalahan tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kemudian, selain dampak bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, dampak kunjungan koperasi juga dirasakan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sebagai kelompok sasaran. Untuk mengerahui dampak tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Berikut kutipan wawancaranya:

“...Dampak dari adanya kunjungan dari dinas koperasi provinsi itu mampu membantu kami mengatasi permasalahan koperasi kami sehingga kami jadi tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Selain itu, adanya kunjungan juga membuat kami merasakan adanya wadah bagi kami untuk menyampaikan fikiran kami secara langsung...” (wawancara dengan Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya kunjungan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga memberikan dampak positif bagi Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu kelompok sasaran. Adanya kunjungan mampu mengembangkan pemikiran koperasi kedepannya dan juga memberikan wadah bagi kopinkra untuk menyampaikan pemikiran secara langsung.

Dari hasil analisis wawancara di atas dapat diketahui bahwa dampak dari pelaksanaan aspek manajemen dalam pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memberikan dampak positif bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Dengan demikian dari hasil analisis pelaksanaan aspek manajemen dalam pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan kunjungan ke Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi jika dilihat dari aspek Pemberdayaan Struktural dan Pemberdayaan Psikologis menurut teori Cho telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari belum diberikannya ruang untuk partisipasi bagi koperasi dalam pengambilan keputusan pemberdayaan.

5.2 Aspek Pendidikan dan Pelatihan

Pada aspek pendidikan dan pelatihan dalam memberdayakan koperasi, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Untuk pendidikan dan pelatihan bagi Kopinkra Pusako

Minang dan koperasi lainnya yang bergerak pada produk unggulan daerah terdapat dua sasaran kegiatan yang dilakukan yaitu pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang meliputi pelatihan struktur koperasi yang baik dan pembuatan laporan keuangan koperasi. Sasaran kedua yaitu pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang meliputi kegiatan pengembangan inovasi produk koperasi.

Adapun analisis secara rinci mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan koperasi menurut teori Cho yaitu :

5.2.1 Pemberdayaan Struktural

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dilihat dari keterlibatan semua pihak dalam kegiatan tersebut mulai dari Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat hingga koperasi sebagai kelompok sasaran. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang kami lakukan untuk koperasi produk unggulan daerah kami fokuskan kepada aspek perkoperasian dan kewirausahaan. Karena permasalahan utama koperasi terletak pada aspek itu misalnya pada struktur koperasi dan keuangan koperasi. Kegiatan kami lakukan dalam jangka waktu tertentu setiap tahunnya dengan mengundang perwakilan koperasi ke Padang. Pelatihan tersebut kami lakukan di Balatkop Provinsi Sumatera Barat...” (wawancara dengan Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 15.18 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi dengan mengundang koperasi-koperasi untuk datang ke Padang. Pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu setiap tahunnya. Selain itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di Balatkop Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk koperasi dilaksanakan di Balatkop Provinsi Sumatera Barat sehingga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi melibatkan pihak Balatkop. Untuk mengetahui keterlibatan Balatkop dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Balatkop Provinsi Sumatera Barat. Adapun wawancaranya yaitu :

“...Sebagian besar kegiatan pelatihan koperasi memang dilaksanakan di Balatkop. Balatkop sendiri beraktivitas sesuai wewenang yang telah dimiliki. Untuk pelaksanaan pemberdayaan koperasi misalnya pelatihan atau pendidikan bagi pengurus koperasi, nantinya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat akan mengkoordinasikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian, apapun yang diperlukan akan kami siapkan termasuk untuk menjadi narasumber dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelatihan. Selain itu, apapun bentuk pelatihan yang dilaksanakan di Balatkop akan selalu kami dampingi karena Balatkop sendiri adalah tanggung jawab kami...” (Wawancara dengan Bapak Donny Ubani SE, MM melalui telepon pada 22 Juli 2021 pukul 10.47 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Balatkop dapat diketahui bahwa sebagian besar kegiatan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dilaksanakan di Balatkop yang terdapat di Jalan S.

Parman no 211. Penglibatan Balatkop sendiri dalam bentuk koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terkait segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan koperasi. Nantinya, Balatkop akan menyiapkan hal yang diperlukan, mendampingi pelaksanaan kegiatan, dan bahkan menjadi narasumber dalam kegiatan apabila diperlukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana penglibatan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Setiap kegiatan pelatihan ke Padang kami menunggu undangan dari dinas koperasi provinsi terlebih dahulu. Ketika adanya kegiatan tersebut kami akan selalu mengirim perwakilan karena menurut kami kegiatan tersebut sangat berguna bagi koperasi kami...” (wawancara dengan Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.38 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang tersebut dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi selalu berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan mengutus beberapa perwakilan koperasi.

Dari beberapa hasil analisis wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dipegang oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi dan tidak melibatkan bidang lain. Keterlibatan pihak lain yaitu

keterlibatan UPTD Balatkop karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagian besar di UPTD Balatkop Sumatera Barat. UPTD Balatkop akan menyiapkan segala hal yang diperlukan terkait materi pendidikan dan pelatihan. Kemudian keterlibatan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sebagai kelompok sasaran yaitu dengan selalu mengirim beberapa perwakilan untuk mengikuti kegiatan.

Selain keterlibatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, partisipasi juga dilihat dari akses berupa adanya kegiatan *public hearing* yang dilaksanakan dalam setiap kegiatan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan, kami selalu menyediakan sesi bagi peserta kegiatan yang berasal dari perwakilan koperasi untuk menyampaikan masukan dan permasalahan koperasinya. Dan permasalahan tersebut langsung dibahas bersama-sama dengan peserta dari koperasi lain...”
(wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 15.20 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di samping adanya akses bagi koperasi untuk menyampaikan permasalahan ketika adanya kunjungan koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, koperasi juga diberikan akses untuk menyampaikan masukan dan permasalahan secara langsung ketika adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pelaksana kegiatan pun menyediakan sesi khusus untuk penyampaian tersebut dalam setiap jadwal kegiatan.

Kemudian, untuk mengetahui adanya pemberian akses bagi koperasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Ketika kegiatan pelatihan ke Padang, di setiap akhir acara memang disediakan sesi untuk menyampaikan permasalahan dari setiap koperasi termasuk untuk menyampaikan masukan. Dan hal tersebut langsung dibahas langsung bersama-sama...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan selalu disisakan waktu di akhir kegiatan untuk sesi penyampaian permasalahan koperasi dan permasalahan tersebut langsung dibahas bersama-sama. Oleh karena itu, dari hasil analisis beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan aspek partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi telah berjalan dengan baik karena koperasi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sebagai sasaran kegiatan dan juga diberikan akses untuk menyampaikan permasalahan koperasi secara langsung dalam kegiatan.

2. Umpan Balik Kinerja

Umpan balik kinerja pada pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut setiap tahunnya dan kinerja yang dilakukan oleh Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu kelompok sasaran yang mengikuti kegiatan pelatihan

dan pendidikan setelah menerima kegiatan tersebut. Untuk mengetahui penggunaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Penggunaan anggaran kami gunakan untuk setiap kegiatan pemberdayaan koperasi yang berkaitan dengan keperluan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Anggaran yang kami peroleh tidak pernah kami realisasikan dalam bentuk bantuan bagi koperasi karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Jadi dengan anggaran tersebut kami harus melaksanakan kegiatan pelatihan dengan semaksimal mungkin...” (hasil wawancara dengan Ibu Dina Febriyanty, SE. M.Si pada 5 Oktober 2020 pukul 14.08 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa anggaran yang diperoleh oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang digunakan untuk kegiatan yang mendukung program pemberdayaan koperasi. Seluruh anggaran yang disediakan hanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak dibagikan dalam bentuk bantuan kepada koperasi karena kendala keterbatasan anggaran.

Tabel 5.1
Penggunaan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
dalam Program Pemberdayaan Koperasi

No	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah Anggaran (Rp)	3.874.168.900	1.587.547.350	1.736.090.153	1.036.036.350
2.	Realisasi Anggaran (Rp)	3.455.000.497	1.504.547.928	1.584.841.787	613.001.094
3.	Persentase (%)	89,61	94,77	91,29	59,17

Sumber : Olahan peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan penggunaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program pemberdayaan koperasi selalu mengalami penurunan sejak tahun 2017. Sehingga, jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan anggaran yang disediakan. Setiap tahun, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat selalu melakukan kegiatan baru yang diperlukan dan juga melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, dengan jumlah anggaran yang terbatas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan yang tidak menggunakan anggaran besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, juga terdapat kegiatan yang tidak terlaksana karena

meningkatnya penyebaran wabah *coronavirus* (COVID-19) di Indonesia termasuk di Sumatera Barat sehingga harus dibatasinya aktivitas yang menimbulkan keramaian dan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Kemudian untuk melihat umpan balik kinerja yang diberikan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Setelah menerima pelatihan di Padang, kami langsung mencoba memperbaiki beberapa permasalahan di koperasi kami sesuai dengan materi pelatihan yang kami terima. Misalnya mencoba memperbaiki struktur koperasi dan memperjelas laporan keuangan koperasi. Namun, yang kami masih kesulitan membuatnya itu grafik penjualan di koperasi kami setiap tahunnya. Sehingga, kami masih belum memiliki grafik tersebut...” (wawancara dengan Ibu Desi Arisandi pada 24 Agustus 2021 pukul 13.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Kopinkra Pusako Minang telah mencoba memberikan umpan balik dengan beberapa hal seperti memperbaiki struktur organisasi dan membuat laporan keuangan yang lebih rinci. Namun, Kopinkra Pusako Minang masih kesulitan dalam membuat grafik penjualan produk setiap tahunnya.

Dari hasil analisis beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan umpan balik kinerja pada aspek pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan anggaran Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang difokuskan untuk keperluan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan semaksimal mungkin walaupun terjadi kendala tidak berjalannya kegiatan yang diakibatkan oleh faktor dari luar. Selain itu, umpan balik kinerja juga terlihat dari aktivitas Kopinkra Pusako Minang yang mulai membenahi struktur organisasi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan juga memperbaiki laporan keuangan dengan lebih rinci.

3. Delegasi

Delegasi pada pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dilihat dari penyerahan wewenang kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan koperasi. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Kegiatan pendidikan dan pelatihan kami lakukan setelah menerima wewenang dari kepala dinas. Kami akan bermusyawarah dengan dinas koperasi kabupaten / kota untuk melihat permasalahan koperasi dan mengetahui kegiatan pelatihan seperti apa yang diperlukan. Seperti kegiatan pendampingan, pendidikan dan pelatihan kami laksanakan sesuai wewenang kami tanpa melibatkan bidang lain. Nanti setelah kegiatan seluruhnya, kami akan memberikan laporan penggunaan anggaran lagi kepada kepala dinas...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 15.23 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyerahan wewenang dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi diberikan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Bidang

Pemberdayaan Koperasi berwenang penuh untuk pelaksanaan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan tanpa melibatkan bidang lain. Dan anggaran yang terpakai untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan seluruhnya, akan dilaporkan kembali kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemberian delegasi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi telah berjalan dengan baik karena adanya kejelasan pemberian wewenang dan laporan penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kembali kepada kepala dinas.

Jika dilihat dari indikator pemberdayaan struktural menurut Cho terkait pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemberdayaan struktural telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya seluruh indikator pemberdayaan struktural menurut teori Cho.

5.2.2 Pemberdayaan Psikologis

1. Makna

Makna dalam pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada koperasi-koperasi yang menjadi kelompok sasaran kegiatan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk penyampaian informasi terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kami menyampaikan informasi singkat terlebih dahulu melalui telepon. Lalu, kami akan mengirimkan undangan kepada koperasi yang mana di dalam undangan tersebut langsung dilampirkan materi kegiatan dan juga jadwal kegiatan secara rinci...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.30 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyampaian informasi terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui telepon terlebih dahulu kepada koperasi-koperasi. Kemudian, undangan kegiatan juga akan dikirimkan secara langsung yang mana dalam undangan tersebut juga dilampirkan materi pendidikan dan pelatihan serta jadwal kegiatan secara rinci.

Untuk mengetahui penyampaian informasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang. Adapun wawancaranya yaitu :

“...Untuk informasi kegiatan pelatihan, itu dinas koperasi provinsi memang menyebarkan informasi melalui telepon terlebih dahulu baik itu melalui grup ataupun secara langsung. Dan untuk kopinkra pusako minang, penyampaian melalui telepon saya sebagai sekretaris koperasi. Undangan nantinya juga menyusul ke koperasi...” (wawancara dengan Ibu Desi Arisandi pada 24 Agustus 2021 pukul 13.50 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyampaian informasi terkait adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui telepon terlebih dahulu. Kemudian, undangan langsung untuk koperasi akan menyusul yang mana disertakan dengan lampiran bentuk kegiatan.

Dari hasil analisis wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator makna berupa penyampaian informasi terkait kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan koperasi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa cara yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan yaitu melalui media telepon dan undangan langsung kepada koperasi.

2. Kompetensi

Kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pemberdayaan koperasi berkaitan dengan kapasitas pemberi materi sesuai dengan aspek yang dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, kami selalu mengundang pemateri yang berkompeten sesuai dengan aspek yang ditetapkan pada jadwal kegiatan. Misalnya untuk perkoperasian kami selalu meminta Bapak Donni Ubani, SE, MM yang merupakan kepala Balatkop Sumbar dan juga sering memberikan materi pelatihan perkoperasian. Kemudian untuk kewirausahaan kami juga pernah mengundang Hidayat, SS yang merupakan anggota Komisi III DPRD Sumbar di bidang keuangan dan ekonomi...” (wawancara dengan Dina Febriyanti, S.E., M.M pada 5 September 2021 pukul 14.10 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan untuk koperasi, Bidang

Pemberdayaan Koperasi selalu mengundang pemateri yang berkompetensi dalam bidang tersebut. Misalnya Bapak Donni Ubani, SE, MM yang merupakan Kepala Balatkop Sumatera Barat dan juga Hidayat, SS yang merupakan anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian, untuk mengetahui aspek kompetensi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi.

Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dari setiap kegiatan pelatihan yang kami ikuti dari dinas koperasi provinsi mereka selalu mengundang pemateri yang berkompeten. Dari cara orang-orang tersebut menyampaikan materi, itu sangat jelas dan membuat kami paham dengan materi yang diberikan...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.42 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat selalu mengundang pemateri yang berkompeten sehingga mampu memberikan materi dengan jelas dan mudah dimengerti oleh perwakilan koperasi yang menjadi peserta kegiatan.

Oleh karena itu, dari beberapa hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat telah baik karena kemampuan mereka mengundang orang-orang berkompeten dalam menyampaikan materi terkait pendidikan dan pelatihan untuk koperasi.

3. Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri pada aspek pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pemberian motivasi untuk koperasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan. Untuk melihat hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“..Untuk pemberian motivasi bagi koperasi kami menimbang jumlah waktu kegiatan pelatihan terlebih dahulu. Tidak dalam setiap kegiatan kami adakan pemberian motivasi tersebut karena kami lebih fokuskan untuk teknis bagi koperasi terlebih dahulu. Dan biasanya untuk motivasi itu kami akan menyediakan satu hari khusus dalam jadwal kegiatan...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.20 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian motivasi untuk koperasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak selalu dilakukan dengan menimbang jadwal kegiatan dan keperluan hal teknis bagi koperasi terlebih dahulu. Selain itu, pelaksanaan kegiatan motivasi juga disediakan satu hari khusus dalam jadwal kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya, untuk mengetahui akan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“..Dalam setiap kegiatan pelatihan yang kami ikuti itu hanya beberapa kali kami memperoleh kegiatan motivasi. Namun, ketika adanya pemberian motivasi, dinas koperasi provinsi memang menyediakan satu hari untuk kegiatan tersebut...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.45 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemberian motivasi memang tidak selalu dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sehingga, berdasarkan aspek penentuan nasib sendiri dapat diketahui bahwa aspek tersebut belum berjalan dengan baik karena pemberian motivasi tidak selalu dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

4. Dampak

Dampak pada aspek pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan nilai yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana kegiatan dan Kopinkra Pusako Minang sebagai kelompok sasaran dari kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut. Untuk mengetahui dampak yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dari adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dari adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi sangat memberikan dampak baik bagi kami karena kami bisa mengatasi permasalahan bagi koperasi dengan membagikan ilmu yang kami miliki kepada koperasi. Selain itu, dengan adanya kegiatan pelatihan kami jadi mengetahui koperasi mana yang sangat memerlukan bantuan kami dan juga koperasi mana yang mampu berkembang seiring kegiatan...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E., M.M pada 5 September 2021 pukul 14.25 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa dampak yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi dari adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi. Dampak tersebut antara lain pelaksana kegiatan jadi mengetahui koperasi mana yang sangat memerlukan bantuan ilmu dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Bidang Pemberdayaan Koperasi juga mengetahui koperasi mana yang mampu berkembang seiring berjalannya kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Untuk mengetahui dampak yang diterima oleh Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu sasaran dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Adanya kegiatan pelatihan sangat berguna bagi kami. Koperasi kami yang dulunya masih kesulitan menetapkan struktur yang baik dan laporan keuangan yang rinci menjadi mampu mengatasi permasalahan itu. Selain itu, semangat kewirausahaan anggota koperasi juga makin berkembang...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.48 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya kegiatan pelatihan dan pendidikan memberikan dampak yang baik bagi kinerja Kopinkra Pusako Minang. Kopinkra Pusako Minang mampu mengatasi permasalahan struktur organisasi yang baik dan juga membuat laporan keuangan dengan makin rinci. Sehingga, dapat diketahui bahwa adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak memberikan dampak negatif bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat serta Kopinkra Pusako Minang sendiri.

Menurut Cho, pemberdayaan psikologis berkaitan erat dengan manajemen dari sasaran dari pemberdayaan. Dari beberapa analisis indikator terkait pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan koperasi, pemberdayaan psikologis telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pemberian motivasi tidak dilaksanakan dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan.

5.3 Teknologi dan Informasi

Aspek teknologi dan informasi berkaitan dengan penerapan pemberian kegiatan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada koperasi yang nantinya mampu mendukung aktivitas koperasi. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk aspek teknologi dan informasi kami tidak pernah melaksanakan kegiatan apapun mulai dari pemberian bantuan sarana dan juga kegiatan workshop. Hal tersebut tidak dilakukan karena sebagian besar koperasi beraktivitas dengan alat yang masih tradisional agar tidak menghilangkan ciri khas dan keunikan produk koperasi tersebut...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E., M.M pada 5 September 2021 pukul 14.30 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tidak pernah melakukan kegiatan yang mendukung aspek teknologi dan informasi karena sebagian besar koperasi masih menggunakan cara tradisional untuk

produksi produk koperasi dengan tujuan untuk menjaga ciri khas dan keunikan produk.

5.4 Kemitraan

Aspek kemitraan pada pelaksanaan pemberdayaan koperasi berkaitan dengan bantuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam menjembatani koperasi dengan pihak luar yang nantinya mampu menjamin dana yang dimasukkan koperasi yang ikut serta. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Pernah satu kali kami melakukan kegiatan *workshop* yang mana kami mewadahi dan menjembatani koperasi yang ingin bekerja sama dalam hal keuangan dengan salah satu BUMN yaitu PT Taspen. Kegiatan itu kami selipkan dalam kegiatan pelatihan. Namun setelah itu kami kembalikan kepada koperasi untuk bebas untuk ikut atau tidak dalam kerjasama tersebut. Koperasi sendiri tidak ikut untuk bekerja sama dengan PT Taspen tersebut...”
(wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.33 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam aspek kemitraan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pernah satu kali menjembatani koperasi dengan PT Taspen guna untuk menjamin keuangan koperasi dan kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berkala. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pun memberikan kebebasan kepada koperasi-koperasi untuk berpartisipasi atau tidak

dalam kerjasama tersebut. Dan untuk Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sendiri memilih untuk tidak berpartisipasi.

Untuk mengetahui alasan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi tidak berpartisipasi dalam kerjasama keuangan dengan PT Taspen tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Memang pernah diadakan workshop untuk kemitraan koperasi dengan PT Taspen. Kopinkra sendiri ikut kegiatan workshopnya namun tidak ikut bermitra dengan Taspen tersebut. Karena sampai sejauh ini Kopinkra masih mampu mengelola keuangan sendiri dengan melibatkan seluruh anggota koperasi dan belum menemukan permasalahan dalam keuangan koperasi dan dari awal dibentuknya Kopinkra Pusako Minang memang tidak pernah terlibat dengan lembaga-lembaga keuangan...” (wawancara dengan Ibu Desi Arisandi pada 24 Agustus 2021 pukul 13.53 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan Kopinkra Pusako Minang tidak ikut dalam mitra dengan PT Taspen adalah karena Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi masih mampu mengelola keuangannya sendiri dengan melibatkan anggota-anggota koperasi. Selain itu, sejak awal berdirinya Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi memang tidak pernah terlibat dengan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

5.5 Bahan Baku

Aspek bahan baku berkaitan dengan kemampuan setiap koperasi menyediakan bahan baku untuk keperluan produksi produk koperasi. Untuk mengetahui kegiatan aspek bahan baku dalam pemberdayaan koperasi, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Kami tidak pernah melakukan kegiatan terkait aspek bahan baku karena sebagian besar koperasi telah mampu memenuhi kebutuhan akan bahan baku sendiri. Koperasi menyediakan bahan baku untuk produk koperasi yang telah mampu memenuhi kebutuhan anggota koperasi...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti,S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 15.25 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi terkait aspek bahan baku karena sebagian besar koperasi telah mampu menyediakan bahan baku sendiri untuk keperluan produksi produk bagi anggota koperasi. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan penyediaan bahan baku produk Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Bahan Baku pada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Karena produk koperasi kami adalah sulaman dan bordiran, jadi bahan baku utama adalah benang. Kami telah mampu menyediakan bahan baku benang tersebut dengan memutar keuangan yang diperoleh koperasi. Benang tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan anggota koperasi yang seluruhnya adalah pengrajin sulaman dan bordiran serta konsumen luar...” (wawancara dengan Ibu Herlina pada 10 Oktober 2021 pukul 09.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi telah mampu menyediakan bahan baku untuk keperluan produksi produk sulaman dan bordiran yaitu berupa benang yang berasal dari perputaran keuangan yang diperoleh koperasi. Bahan baku tersebut juga telah mampu memenuhi kebutuhan produksi bagi seluruh anggota koperasi.



5.6 Produksi dan Pengolahan

Aspek produksi dan pengolahan berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam mengolah bahan baku sehingga mampu menjadi produk yang bernilai jual. Untuk mengetahui kegiatan pemberdayaan koperasi pada aspek produksi dan pengolahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera

Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.

Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk aspek produksi dan pengolahan tidak ada kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan karena koperasi telah memiliki kemampuan dalam memproduksi dan mengolah bahan baku yang mereka miliki sehingga menjadi produk yang bernilai jual dengan inovasi dan kreasi mereka...” (wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M,Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.58 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam aspek produksi dan pengolahan, Bidang Pemberdayaan Koperasi tidak melaksanakan kegiatan apapun karena koperasi telah mampu memproduksi dan mengolah bahan baku mereka sendiri sehingga menjadi produk yang bernilai jual. Kemudian, untuk mengetahui kemampuan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam memproduksi dan mengolah bahan baku mereka, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Dari bahan baku yang tersedia di koperasi, kami telah mampu memproduksi beberapa produk yang bernilai jual. Misalnya jilbab dan mukena. Produk tersebut ada yang bermotif satu warna maupun dengan banyak warna...” (wawancara dengan Ibu Desi Arisandi pada 24 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang telah memiliki kemampuan dalam memproduksi dan mengolah bahan baku benang yang tersedia di koperasi. Beberapa produk yang telah diproduksi yaitu jilbab dan mukena. Produk tersebut juga terdiri dengan berbagai

macam motif yang menggunakan satu warna ataupun banyak warna. Berikut beberapa contoh produk jilbab dan mukena dari Kopinkra Pusako Minang :

Gambar 5.3
Produk Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2021

5.7 Permodalan

Aspek permodalan dalam pemberdayaan koperasi berkaitan dengan uang atau barang yang digunakan oleh koperasi untuk menjalankan aktivitasnya baik yang berasal dari luar maupun yang dikelola oleh koperasi sendiri. Dalam aspek permodalan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga tidak pernah melakukan kegiatan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan

wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Seperti yang disampaikan sebelumnya anggaran dinas untuk pemberdayaan koperasi masih bisa dibbilang terbatas. Sehingga tidak memungkinkan bagi kami memberikan uang sebagai modal bagi koperasi yang kekurangan modal...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti,S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.40 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tidak adanya pelaksanaan kegiatan dalam aspek permodalan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang disediakan sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan permodalan kepada koperasi.

Selanjutnya, untuk melihat penggunaan permodalan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan bendahara Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Permodalan kopinkra itu berasal dari iuran anggota koperasi dan juga dari dana hibah yang kami peroleh dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Kemudian, uang tersebutlah yang selalu kami putarkan untuk menjaga aktivitas koperasi kami...” (wawancara dengan Ibu Hj. Ismawati pada 10 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa modal yang diperoleh oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi untuk mendukung aktivitas koperasi berasal dari iuran anggota dan juga dana bantuan hibah yang

berasal dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Berikut penggunaan anggaran dana hibah yang diperoleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi :

Gambar 5.4
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah Kopinkra Pusako Minang

KOPERASI INDUSTRI KERAJINAN RAKYAT PUSAKO MINANG (KOPINKRA PUSAKO MINANG) Badan Hukum : 42/BH/III.10/X-2012/ .. Soekarno Hatta / Pasar Banto Kelurahan ATT5 Kecamatan Guguk Panjang	
PERINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KOPERASI PUSAKO MINANG	
1. Beli benang skoci dan jarum	Rp 5.837.700
2. Beli kain dan benang	Rp 3.842.300
3. Beli kain katun yima, katun silki, katun minyak	Rp 18.052.100
4. Beli benang bordir	Rp 21.615.000

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020

5.8 Pemasaran

Pemasaran dalam pemberdayaan koperasi berkaitan dengan usaha untuk memperluas jangkauan pasar dari produk-produk koperasi. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan aspek pemasaran yaitu antara lain penyediaan sarana pemasaran dan pemberian dukungan promosi produk serta jaringan pemasaran. Berikut rincian analisis kegiatan pelaksanaan pemberdayaan koperasi berdasarkan aspek pemasaran yang dianalisis berdasarkan teori Cho :

5.8.1 Pemberdayaan Struktural

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

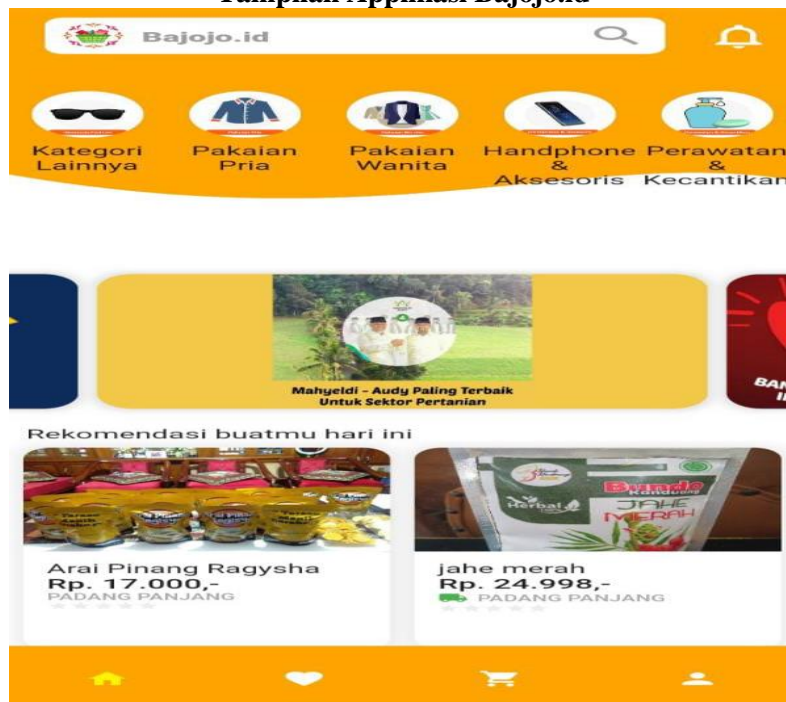
Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran produk koperasi berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Untuk mengetahui seperti apa sarana yang telah disediakan untuk pemasaran produk koperasi dan langkah untuk memperluas jaringan pemasaran produk, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam hal pemasaran produk koperasi, yang kami lakukan adalah mengembangkan sistem penyebarluasan pemasaran dengan membentuk aplikasi bajojo.id yang mana dapat digunakan seperti toko online dalam memasarkan produk koperasi. Aplikasi tersebut dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumbar kemudian dipegang dan dikelola oleh Pegawai Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mana ketuanya adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil...” (wawancara dengan Bapak Ir. Zirna Yusri pada pada 13 September 2021 pukul 13.15 WIB via Telepon)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemasaran adalah pembentukan aplikasi bajojo.id yang mana setiap anggota koperasi bisa mempromosikan secara pribadi produk di aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan dikelola oleh Kepala PLUT Sumatera Barat yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun tampilan dari aplikasi bajojo.id adalah sebagai berikut :

Gambar 5.5
Tampilan Aplikasi Bajojo.id



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2021

Untuk mengetahui partisipasi PLUT Sumatera Barat dalam mengembangkan aplikasi bajojo.id peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam aplikasi bajojo.id kami dilibatkan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Aplikasi bajojo.id telah beberapa kali kami coba kembangkan, namun selalu mengalami kesulitan mengatasi permasalahan server aplikasi. Selain itu, kami juga dilibatkan dalam mempromosikan aplikasi ini kepada masyarakat...” (wawancara dengan Bapak Ir. Nasrizal, MM pada 28 September 2021 pukul 10.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PLUT Sumatera Barat terlibat dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi bajojo.id.

Selain itu, PLUT Sumatera Barat juga dilibatkan dalam mempromosikan aplikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat baik yang merupakan anggota koperasi atau bukan anggota koperasi mampu menggunakan aplikasi tersebut.

Kemudian, untuk mengetahui partisipasi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam kegiatan pemasaran, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk aplikasi bajojo.id itu kami tidak pernah memasukkan produk kesana karena loading aplikasinya lama...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi tidak pernah berpartisipasi dalam pemasaran produk melalui aplikasi bajojo.id. Kopinkra Pusako Minang tidak pernah sekalipun memasarkan produk disana karena aplikasi yang masih belum maksimal.

Dari hasil analisis beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator partisipasi dalam aspek pemasaran belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya partisipasi dari Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam memasarkan produk melalui sarana yang telah disediakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

2. Umpan balik kinerja

Umpan balik kinerja pada aspek pemasaran berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi setelah menerima informasi mengenai adanya aplikasi bajojo.id. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Sejak aplikasi bajojo.id Kopinkra Pusako Minang tidak terlalu memperlihatkan umpan balik kinerja dengan memanfaatkan sarana pemasaran yang telah kami sediakan karena memang produk Kopinkra tidak terlalu memiliki banyak peminat di aplikasi dan masih lemahnya sistem dalam aplikasi bajojo.id...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti,S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.00 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi belum memperlihatkan umpan balik yang baik sejak adanya aplikasi bajojo.id karena Kopinkra Pusako Minang belum pernah memanfaatkan aplikasi bajojo.id untuk keperluan pemasaran dan hanya beberapa kali menitipkan produknya di kantor PLUT.

Kemudian, untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk mempromosikan produk koperasi diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sarana atau tidak. Karena aplikasi bajojo.id loadingnya sangat lama, koperasi kami pun memutuskan untuk mempromosikan produk secara pribadi melalui media sosial...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.53 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan Kopinkra Pusako Minang tidak ikut memasarkan produk melalui kantor PLUT ataupun aplikasi bajojo.id adalah karena memakan waktu yang lama sehingga Kopinkra Pusako Minang memutuskan untuk mempromosikan produk secara pribadi melalui media sosial.

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator umpan balik kinerja dalam pelaksanaan aspek pemasaran belum berjalan dengan baik karena belum adanya umpan balik yang diberikan oleh Kopinkra Pusako Minang sebagai kelompok sasaran dari adanya penyediaan sarana dan aplikasi pemasaran tersebut.

3. Delegasi

Delegasi dalam pelaksanaan aspek pemasaran berkaitan dengan penyerahan wewenang dalam pembentukan aplikasi bajojo.id. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Pengembangan dan pengelolaan aplikasi bajojo.id itu saya serahkan kepada pegawai Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) karena PLUT merupakan pusat berbagai usaha rakyat. Kemudian merekalah yang berwenang dalam mencari ahli dalam pengembangan aplikasi tersebut...” (wawancara dengan bapak Ir. Zirna Yusri i pada 13 September 2021 pukul 13.05 WIB via Telepon)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendelegasian wewenang dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi bajojo.id dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada PLUT Sumatera Barat yang dikelola oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. PLUT memiliki wewenang dalam mencari tenaga ahli untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut.

Untuk mengetahui wewenang yang telah dilakukan PLUT Sumatera Barat dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi bajojo.id, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Sejak diperkenalkannya aplikasi bajojo.id kami telah melakukan beberapa wewenang dalam mengembangkan aplikasi tersebut. Antara lain dengan memproses data bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan aplikasi bajojo.id dan mencari ahli IT dalam mengembangkan aplikasi tersebut...” (wawancara dengan Bapak Ir. Nasrizal pada 28 September 2021 pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PLUT Sumatera Barat sebagai pengelola aplikasi bajojo.id telah melakukan beberapa wewenang antara lain memproses data pengguna aplikasi yang ingin mendaftar dan mencari tenaga ahli IT dalam mengembangkan aplikasi bajojo.id tersebut.

Oleh karena itu, dari indikator delegasi wewenang pada pelaksanaan aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi dapat dilihat adanya delegasi wewenang yang jelas dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil yang sekaligus merupakan Kepala Pengelola PLUT Sumatera Barat.

Dengan demikian, berdasarkan teori Cho dapat dilihat bahwa pemberdayaan struktural dari pelaksanaan aspek pemasaran belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terlaksananya beberapa indikator pemberdayaan struktural menurut Cho terutama dalam indikator partisipasi dan umpan balik kinerja.

5.8.2 Pemberdayaan Psikologis

1. Makna

Makna dalam pelaksanaan aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi berkaitan dengan penyampaian informasi terkait adanya aplikasi bajojo.id dalam menunjang pemasaran produk koperasi. Untuk mengetahui penyampaian informasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Penyampaian informasi terkait aplikasi bajojo.id itu tidak kami lakukan dalam bentuk kegiatan langsung namun hanya diselipkan dalam kegiatan lain sebelum peluncuran aplikasi. Kemudian kami juga menyampaikan informasi melalui media sosial dan koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten / kota...” (wawancara dengan Bapak Ir. Nasrizal pada 28 September 2021 pukul 10.20 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam menyampaikan informasi terkait adanya aplikasi bajojo.id. Pertama melalui sosialisasi dalam kegiatan pelatihan. Kemudian melalui koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten / kota untuk menyampaikan kepada seluruh koperasi di kabupaten / kota dan termasuk pelaku UKM.

Selanjutnya, untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Untuk penyampaian informasi terkait aplikasi pernah dilakukan beberapa kali dalam kegiatan pelatihan. Namun informasi masih belum terlalu jelas. Kopinkra sendiri merasa masih kesulitan menggunakan aplikasi tersebut...” (wawancara dengan Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.55 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi bajojo.id karena masih minimnya informasi mengenai aplikasi tersebut. Sehingga dengan demikian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator makna dalam aspek pemasaran pada pemberdayaan koperasi masih belum berjalan maksimal karena masih belum optimalnya penyampaian informasi terkait aplikasi.

2. Kompetensi

Kompetensi dalam aspek pemasaran berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama pengelola

aplikasi bajojo.id dalam mengembangkan aplikasi tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk pengembangan aplikasi bajojo.id kami masih memiliki kompetensi yang rendah sehingga kami mencoba bekerjasama dengan ahli IT. Namun masih terdapat banyak kendala aplikasi misalnya server yang masih lambat sehingga memakan waktu yang lama untuk loading produk yang ditawarkan...” (wawancara dengan Bapak Ir. Nasrizal, MM pada 28 September 2021 pukul 10.23 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengelola aplikasi bajojo.id masih memiliki kelamahan kapasitas dalam mengembangkan aplikasi. Pengelola pun telah bekerjasama dengan ahli IT namun masih terdapat beberapa permasalahan terutama pada server aplikasi. Aplikasi masih memakan waktu yang lama dalam loading produk yang ditawarkan di dalam aplikasi tersebut.

Kemudian, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Saya pernah beberapa kali mencoba mempromosikan produk melalui aplikasi bajojo.id itu namun itu sangat susah karena memakan waktu yang lama untuk memasukkan produk ke aplikasi...” (wawancara dengan Ibu Yet pada 25 Agustus 2021 pukul 13.05 WIB via Telepon)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aplikasi bajojo.id masih memiliki permasalahan terutama dari segi server aplikasi. Aplikasi masih

memakan waktu yang lama dalam mempromosikan produk. Dengan demikian, berdasarkan indikator kompetensi dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam aspek pemasaran masih rendah karena masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam penggunaan sarana pemasaran yang telah disediakan untuk promosi produk koperasi.

3. Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri pada aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi berkaitan dengan motivasi yang diperoleh Kopinkra Pusako Minang dari adanya sarana pemasaran produk koperasi terutama aplikasi bajojo.id. Untuk mengetahui motivasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Adanya sarana pemasaran produk koperasi kami harapkan mampu menumbuhkan semangat koperasi dalam memasarkan produknya. Namun kami tidak memaksakan kepada tiap koperasi untuk menggunakan sarana tersebut dan mengembalikan kepada koperasi untuk menentukan sendiri cara mereka memasarkan produk...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.05 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut selain dalam usaha mewedahi pemasaran produk koperasi, adanya sarana pemasaran juga bertujuan untuk pengembangan semangat koperasi dalam usaha mempromosikan produk koperasi. Walaupun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tidak memaksakan koperasi untuk menggunakan sarana pemasaran yang telah disediakan tersebut.

Lebih lanjut, untuk mengetahui motivasi Kopinkra Pusako Minang dari adanya sarana pemasaran produk dan cara yang dilakukan Kopinkra Pusako Minang dalam memasarkan produknya sendiri, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Sebenarnya menurut saya jika sarana pemasaran yang disediakan dinas koperasi provinsi itu berjalan dengan baik mungkin akan mampu memacu semangat anggota koperasi untuk memasarkan produk menggunakan sarana tersebut. Namun karena kendala tadi, akhirnya kami memutuskan untuk memasarkan produk melalui sosial media dan menitipkan produk kami di toko oleh-oleh di Kota Bukittinggi...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.58 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya permasalahan dalam sarana pemasaran yang disediakan sedikit menurunkan motivasi Kopinkra Pusako Minang dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan. Kopinkra Pusako Minang akhirnya memilih untuk memasarkan produknya melalui sosial media dan menitipkan produk ke toko-toko oleh-oleh di Kota Bukittinggi.

Dari beberapa hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa indikator penentuan nasib sendiri pada pelaksanaan aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak terciptanya motivasi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dari adanya sarana pemasaran dan memilih memasarkan produk dengan cara sendiri

4. Dampak

Dampak dalam aspek pemasaran berkaitan dengan nilai yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dari adanya penyediaan sarana pemasaran produk dan bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sebagai kelompok sasaran. Untuk mengetahui dampak yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dari adanya penyediaan sarana pemasaran produk koperasi terutama aplikasi bajojo.id sepertinya tidak sepenuhnya memberikan dampak positif. Di satu sisi kami bisa membantu koperasi dalam menambah jaringan pemasaran namun di sisi lain karena permasalahan sarana pemasaran menyebabkan sarana pemasaran tersebut jadi jarang digunakan...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, SE, M.M pada 5 September 2021 pukul 14.05 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari adanya penyediaan sarana pemasaran produk koperasi tidak sepenuhnya memberikan dampak positif. Disamping berkontribusinya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam membantu memasarkan produk dan menambah jaringan pemasaran, permasalahan sarana pemasaran juga menimbulkan rendahnya minat koperasi terhadap sarana pemasaran yang telah disediakan.

Selanjutnya, untuk mengetahui dampak yang diterima Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Adanya sarana pemasaran produk koperasi yang disediakan oleh dinas koperasi provinsi sangat kami apresiasi. Namun, sejauh ini kami belum memperoleh dampak yang baik dari adanya sarana tersebut. Kendala pada sarana membuat kami harus mencoba memasarkan produk secara mandiri...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari adanya sarana pemasaran yang disediakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat belum memberikan dampak positif maupun dampak bagi Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu kelompok sasaran.

Dari indikator makna dalam pelaksanaan aspek pemasaran pada pemberdayaan koperasi dapat dilihat bahwa adanya penyediaan sarana pemasaran belum memberikan dampak positif bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dan hanya memberikan dampak berkurangnya minat koperasi terhadap keinginan dalam menggunakan sarana pemasaran yang telah disediakan.

Menurut Cho, pemberdayaan psikologis sangat mempengaruhi kinerja manajemen terutama terhadap kelompok sasaran dari pemberdayaan. Berdasarkan beberapa indikator pemberdayaan psikologis menurut teori Cho dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan psikologis belum berjalan dengan baik karena masih banyak indikator yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Secara keseluruhan, berdasarkan teori Cho dan Faerman terdapat dua variabel pemberdayaan yaitu Pemberdayaan Struktural dan Pemberdayaan Psikologis. Dalam dua variabel tersebut terdapat beberapa indikator terkait pemberdayaan struktural dan pemberdayaan psikologis dalam pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemberdayaan struktural terdapat tiga indikator yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, umpan balik kinerja, dan delegasi. Jika dianalisis berdasarkan 8 aspek pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat maka diperoleh beberapa hasil analisis.

Pertama, dari indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan, dari 8 aspek pemberdayaan koperasi pemberian partisipasi bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi hanya pada aspek manajemen serta pendidikan dan pelatihan. Kemudian partisipasi sendiri juga dilakukan Kopinkra Pusako Minang dalam aspek permodalan terkait pengelolaan dana hibah dari Pemkot Bukittinggi dan pada aspek pemasaran dalam hal promosi produk melalui media sosial setiap anggota koperasi dan menitipkan produk ke toko oleh-oleh Kota Bukittinggi. Sedangkan untuk aspek teknologi dan informasi, kemitraan, bahan baku, produksi dan pengolahan tidak terlihat adanya partisipasi dari Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Selain partisipasi dari koperasi, partisipasi juga terlihat dari pihak lain yaitu partisipasi Diskoperindag Kota Bukittinggi pada aspek manajemen, partisipasi Balatkop pada aspek pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi PLUT dalam aspek pemasaran. Kedua, pada indikator umpan balik kinerja dapat dilihat bahwa umpan balik kinerja yang baik hanya dilakukan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi pada aspek manajemen dan aspek pendidikan dan pelatihan. Sedangkan, untuk aspek lainnya tidak terlihat adanya umpan balik kinerja dari Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi karena tidak

adanya pelaksanaan beberapa aspek pemberdayaan. Ketiga, dari indikator delegasi berupa penyerahan wewenang terlihat bahwa adanya kejelasan penyerahan wewenang dalam setiap pelaksanaan aspek pemberdayaan antara lain penyerahan wewenang dari kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan aspek manajemen serta aspek pendidikan dan pelatihan, dan penyerahan wewenang kepada PLUT dalam mengembangkan aplikasi bajojo.id pada aspek pemasaran.

Variabel pemberdayaan menurut Cho dan Faerman selanjutnya yaitu Pemberdayaan Psikologis yang terdiri dari empat indikator antara lain makna, kompetensi, penentuan nasib sendiri, dan dampak. Pertama berdasarkan aspek makna yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada koperasi terkait adanya kegiatan pemberdayaan dapat dilihat bahwa telah terlaksananya penyampaian informasi baik secara langsung maupun melalui media telepon kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi terutama pada aspek manajemen, aspek pendidikan dan pelatihan. Untuk aspek pemasaran, penyampaian informasi melalui sosialisasi terkait aplikasi bajojo.id terlihat masih rendah. Untuk aspek lainnya tidak ada penyampaian informasi karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan.

Kedua, berdasarkan aspek kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan 8 aspek pemberdayaan dinilai sudah baik untuk aspek manajemen dan aspek pendidikan dan pelatihan yang terlihat dari kemampuan perwakilan yang melaksanakan kegiatan pada aspek manajemen dan kemampuan dari narasumber dalam kegiatan pendidikan dan

pelatihan. Kemudian, kompetensi dalam hal pengembangan aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi masih rendah yang mana terlihat dari masih rendahnya kualitas aplikasi bajojo.id. Dan untuk aspek lainnya tidak terlihat adanya kompetensi karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, berdasarkan indikator penentuan nasib sendiri terlihat adanya pelaksanaan pemberian motivasi bagi koperasi selalu terlaksana dalam aspek manajemen. Untuk aspek pendidikan dan pelatihan, pemberian motivasi hanya terlaksana beberapa kali tergantung ketersediaan waktu dalam kegiatan. Kemudian untuk aspek produksi dan pengolahan, Kopinkra Pusako Minang berusaha sendiri dalam mengembangkan motivasi dan kreasi terhadap produk koperasi dan terlihat adanya peningkatan kreasi produk koperasi tersebut. Sedangkan untuk aspek teknologi dan informasi, kemitraan, bahan baku, permodalan, dan pemasaran tidak terlihat adanya pemberian motivasi kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi.

Keempat, berdasarkan indikator dampak dari pelaksanaan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat beberapa aspek memberikan dampak positif bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi antara lain aspek manajemen, pendidikan dan pelatihan, permodalan, produksi dan pengolahan. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari beberapa perubahan yang diterima Kopinkra Pusako Minang dalam hal pembukuan koperasi dan laporan koperasi yang sudah mulai sistematis, peningkatan kemampuan pengurus dan anggota koperasi, kemampuan mengatur keuangan untuk permodalan koperasi, dan perubahan produk koperasi yang mulai diproduksi sesuai dengan selera

konsumen. Untuk aspek pemasaran tidak terlihat adanya dampak yang diberikan terkait adanya aplikasi bajojo.id. Dan juga tidak terlihat adanya dampak dari aspek teknologi dan informasi dan bahan baku karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan.

Selain beberapa variabel pemberdayaan menurut Cho dan Faerman di atas, berdasarkan Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilihat dari kemampuan koperasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁵⁹ Jika dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat telah mencapai keberhasilan bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi karena Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi telah mampu tumbuh dan berkembang menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri. Ketangguhan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dapat dilihat dari perubahan pelaporan keuangan koperasi, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan setiap anggota koperasi terutama terkait bahan baku produk, dan kemampuan dalam menjawab kebutuhan pasar dalam mengembangkan berbagai jenis produk koperasi dalam usaha memperluas jangkauan pasar. Kemudian, kemandirian Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi terlihat dari kemampuan koperasi mengelola keuangan sendiri untuk dijadikan modal tanpa melibatkan lembaga keuangan lain, kemampuan anggota koperasi untuk mempromosikan produk melalui media sosial dan menjalin relasi dengan toko-toko oleh-oleh Kota

⁵⁹ Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil pasal I

Bukittinggi, dan kemampuan mengembangkan produk koperasi menjadi produk jadi yang bernilai jual.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal karena terdapat beberapa aspek pemberdayaan yang masih belum terlaksana.

Dalam aspek pemberdayaan koperasi yang terdapat pada Perda Sumbar nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang difokuskan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi antara lain aspek manajemen, pendidikan dan pelatihan, teknologi dan informasi, kemitraan, bahan baku, permodalan, dan pemasaran. Dari beberapa aspek tersebut, tidak seluruh aspek dilaksanakan karena aspek tersebut adalah aspek permasalahan koperasi secara umum. Untuk koperasi yang bergerak pada produk unggulan daerah hanya beberapa aspek yang dilaksanakan secara berkala antara lain manajemen, pendidikan dan pelatihan, dan aspek pemasaran,

Berdasarkan indikator pemberdayaan koperasi pada teori Cho dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat

dilihat dari masih banyaknya indikator yang belum terlaksana terkait teori pemberdayaan menurut Cho. Dari variabel pemberdayaan struktural, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat belum melibatkan koperasi dalam pengambilan keputusan dan masih belum terciptanya umpan balik kinerja dari koperasi terutama Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu kelompok sasaran pemberdayaan. Sedangkan indikator wewenang telah berjalan dengan baik karena sudah jelasnya penyerahan wewenang kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan koperasi pada Perda Sumbar nomor 16 tahun 2019.

Kemudian, berdasarkan variabel pemberdayaan psikologis secara keseluruhan masih banyak indikator yang belum terlaksana antara lain penyampaian informasi dalam aspek pemasaran yang masih minim, kompetensi pengelola sarana pemasaran yang masih rendah, motivasi bagi koperasi belum berjalan maksimal, dan masih terlihat adanya dampak negatif dari pelaksanaan aspek pemberdayaan koperasi yang terdapat pada Perda Sumbar nomor 16 tahun 2019.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan diantaranya :

6.2.1 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Adapun saran peneliti untuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana program pemberdayaan koperasi adalah sebagai berikut :

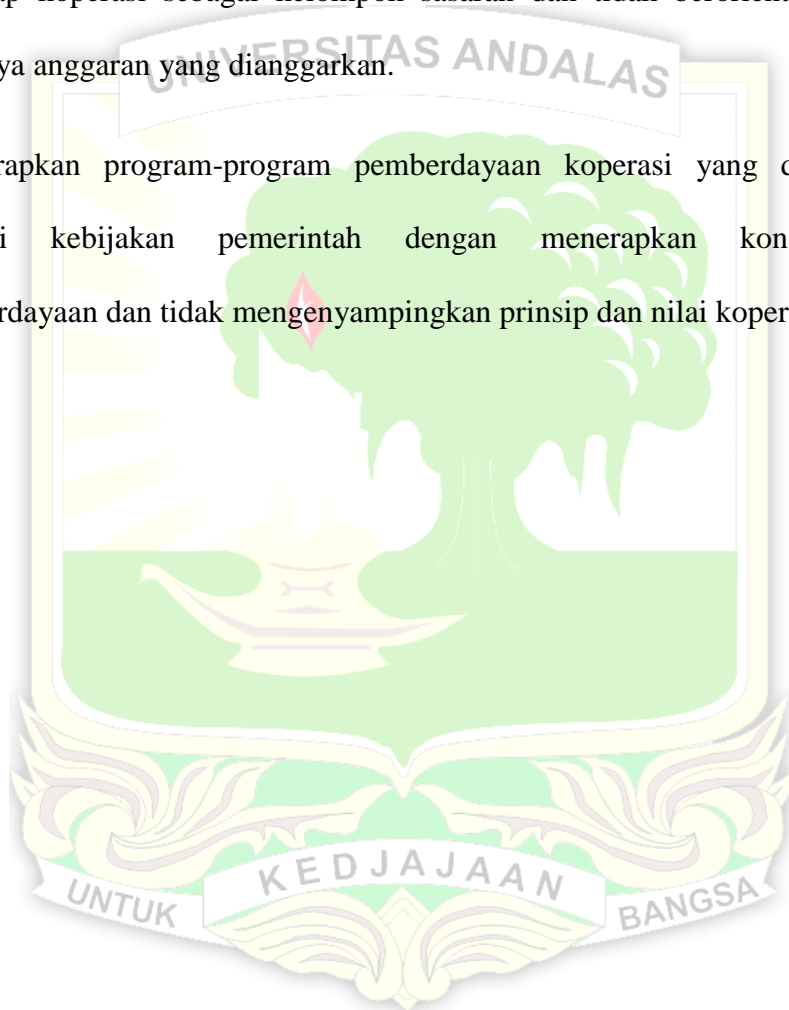
1. Semakin giatnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program pemberdayaan terhadap koperasi di seluruh Provinsi Sumatera Barat sehingga adanya pemerataan dampak yang diterima.
2. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat harus selalu mengumpulkan data yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui program dan kegiatan yang diperlukan dalam memberdayakan setiap koperasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan koperasi dalam mengambil keputusannya.
3. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menunjuk beberapa orang tenaga pendamping dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap koperasi di seluruh Provinsi Sumatera Barat sehingga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat bisa mempermudah komunikasi dalam mengetahui perkembangan dan aktivitas koperasi setiap harinya
4. Semakin giatnya Dinas Koperasi dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada koperasi dan pelaku ekonomi terkait sarana pemasaran produk yang telah disediakan.

6.2.2 Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Koperasi

1. Semakin memperbanyak kegiatan motivasi terhadap seluruh koperasi di Sumatera Barat yang memiliki produk yang bisa diperjual belikan sehingga

produk koperasi memiliki daya saing dan semakin meningkatkan perekonomian anggota koperasi.

2. Meningkatkan pelaksanaan program pemberdayaan yang berorientasi kepada keberhasilan pelaksanaan program dari sisi manfaat dan perubahan positif terhadap koperasi sebagai kelompok sasaran dan tidak berorientasi kepada besarnya anggaran yang dianggarkan.
3. Menerapkan program-program pemberdayaan koperasi yang dirumuskan melalui kebijakan pemerintah dengan menerapkan konsep-konsep pemberdayaan dan tidak menyampingkan prinsip dan nilai koperasi.



Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Proyek Pengembangan LPTK
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Husaini, Usman dan Parmono Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta : Erlangga
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung : UNPAD Press
- Narimawati, Umi. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Bandung : Universitas Komputer Indonesia
- Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : CSIS
- Rudianto. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- , 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pengembangan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media
- Winarni, Tri. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong abad 21 : Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta : Aditya Media
- Wreswiniro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta : Visimedia
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Jurnal

- Cho, Taejun dan Faerman, Sue R. 2009. An Integrative Approach to Empowerment : Construct Definition, Measurement, and Validation. *Public Management Review* vol 12 (1)
- Gunarianto dan Mulyono. 2018. Model Pengembangan One Tambon One Product dalam Upaya Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar untuk Memasuki Pasar ASEAN di Malang Raya. *CIASTECH 2018 Universitas Widyagama Malang*
- Hanny, dkk. 2017. Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. *Jurnal Akuntansi* vol 9 (1)
- Haryanti, Dewi Meisari. 2016. Koperasi dan Pemerataan Pembangunan. *Research and Policy Insight FEB UI* vol 1 (3)

- Monawar, Noor. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS* vol 1 (2)
- Nelson, Soraya Nurhuda. 2016. Komunikasi Promosi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam Mempromosikan Produk Unggulan Bordir Kerancang Kota Bukittinggi. *E-skripsi Universitas Andalas* vol 12 (1)
- Nugrianti, Oni dan Zulkarnaini. 2013. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Alokasi Dana. *Jurnal Kebijakan Publik* vol 4 (1)
- Ratmono, dkk. 2016. Pendekatan OVOP sebagai Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kota Provinsi Lampung. *Jurnal DERIVATIF* vol 10 (2)
- Sari, Elvina. 2018. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Ekonomi Creative (KECE) di Kampung Purnama Tunggal (Studi pada Dinas Perindustrian Lampung Tengah). *Jurnal Ekonomi* vol 3 (2)
- Sumardjo. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Provinsi Jawa Barat (Desertasi). *Jurnal Pascasarjana IPB* vol 5 (3)
- Wahyudi, Aris. 2016. Efektivitas dan Efisiensi Implementasi OVOP dalam Pengembangan IKM Gerabah di Kasongan. *Jurnal Tata Kelola Seni* vol 2 (1)

Dokumen

Kesepakatan Bersama nomor 516/146.a/Diskop-PUK/2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) melalui Koperasi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Perundang-undangan

Permendagri RI nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 516-415-2014 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan Satu Daerah Satu Produk (*One Village One Product*) melalui Koperasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil

Website

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15> (update terakhir : 25 Juni 2018)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-di-indonesia>

<https://Bukittinggi.go.id/berita/ketua-dekranasda-kunjungi-dua-koperasi>

Sumber Lain

Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Wawancara dengan Kepala UPTD Balatkop Sumatera Barat

Wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang

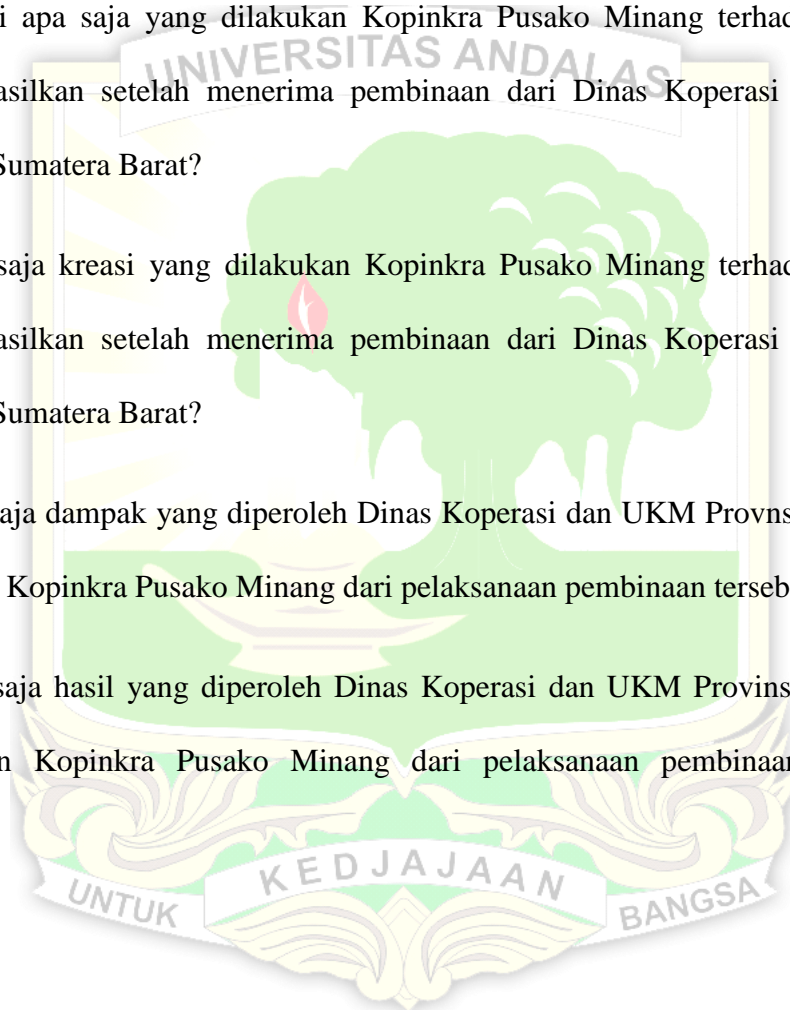
Wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang

Pedoman Wawancara

Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi

1. Bagaimana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melibatkan semua pihak dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang?
2. Bagaimana penggunaan anggaran Kopinkra Pusako Minang setelah menerima program pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mendistribusikan wewenang kepada semua pihak yang terkait dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang?
4. Apakah kewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat?
5. Apakah aktivitas yang dilaksanakan oleh Kopinkra Pusako Minang telah sesuai dengan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat?
6. Bagaimana bentuk spesialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang?

7. Bagaimana kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang?
8. Bagaimana cara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam menumbuhkan sikap inovasi dan kreasi Kopinkra Pusako Minang?
9. Inovasi apa saja yang dilakukan Kopinkra Pusako Minang terhadap produk yang dihasilkan setelah menerima pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat?
10. Apa saja kreasi yang dilakukan Kopinkra Pusako Minang terhadap produk yang dihasilkan setelah menerima pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat?
11. Apa saja dampak yang diperoleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan Kopinkra Pusako Minang dari pelaksanaan pembinaan tersebut?
12. Apa saja hasil yang diperoleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan Kopinkra Pusako Minang dari pelaksanaan pembinaan tersebut.





Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat
(Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

ORIGINALITY REPORT

28%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	repository.uma.ac.id Internet Source	2%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
4	diklat.sumbarprov.go.id Internet Source	2%
5	diskopumkm.sumbarprov.go.id Internet Source	1%
6	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Putera Indonesia YPTK Padang Student Paper	1%
8	www.koperasiukm.lampungprov.go.id Internet Source	1%

9	203.130.196.151 Internet Source	1%
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
11	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	1%
12	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
13	docplayer.info Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1%
15	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
16	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
18	www.scribd.com Internet Source	<1%

Submitted to Siliwangi University

1

